



Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STATISTIK
DIREKTORAT JENDERAL
PHPL

20
19



Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STATISTIK
DIREKTORAT JENDERAL
PHPL

20
19

KATA PENGANTAR

Buku data statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2019 bertujuan untuk mempublikasikan data-data mengenai pembangunan kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang terangkum secara komprehensif dari bulan Januari hingga Desember 2019.

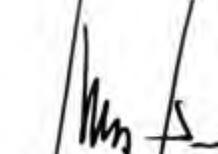
Data dan informasi yang terangkum di dalam buku data statistik ini merupakan hasil pemutakhiran data dan informasi yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2019 yang diperoleh dari berbagai sumber data dan informasi. Beberapa data disajikan secara *time series* sejak tahun 2014 hingga 2019.

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak. Kritik dan saran kami harapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan buku data statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di waktu yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku data statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan hutan Produksi Lestari tahun 2019.

Jakarta, September 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ir. Misran, MM

NIP. 19621212 199303 1 001

DAFTAR ISI

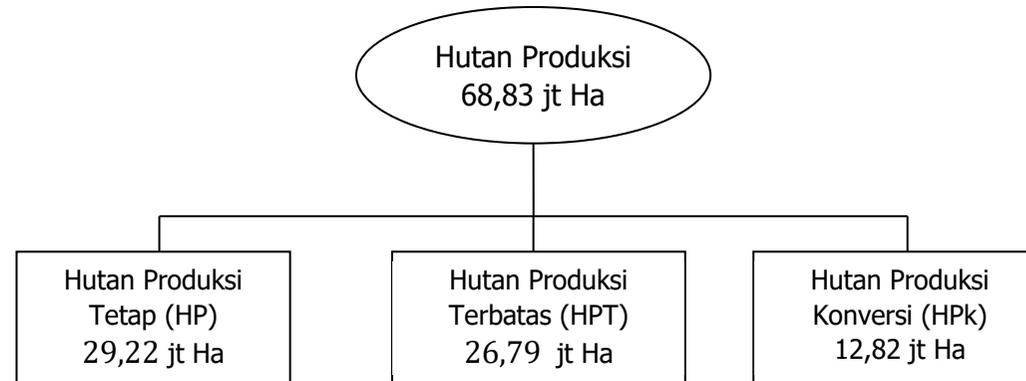
- i KATA PENGANTAR**
- ii DAFTAR ISI**
- 1 RINGKASAN**
- 8 TABEL 1.1**
LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019
- 9 TABEL 1.2**
LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN YANG TIDAK DIBEKANI IZIN UNTUK PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2019
- 10 TABEL 1.3**
PENETAPAN WILAYAH KPHP TAHUN 2019
- 27 TABEL 2.1**
PERKEMBANGAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) TAHUN 2014-2019
- 28 TABEL 2.2**
PERKEMBANGAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK -HTI) TAHUN TAHUN 2014-2019
- 29 TABEL 2.3**
INVESTASI IUPHHK-HA PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 30 TABEL 2.4**
INVESTASI IUPHHK-HTI PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 31 TABEL 2.5**
PENANAMAN PADA IUPHHK-HA PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 32 TABEL 2.6**
PENANAMAN PADA IUPHHK-HTI PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 33 TABEL 2.7**
PRODUKSI KAYU BULAT IUPHHK-HA PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 34 TABEL 2.8**
PRODUKSI KAYU BULAT IUPHHK-HTI PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 35 TABEL 2.9**
TENAGA KERJA IUPHHK-HA PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 36 TABEL 2.10**
TENAGA KERJA IUPHHK-HTI PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 37 TABEL 3.1**
PERKEMBANGAN IUPHHK-RE TAHUN 2019
- 38 TABEL 3.2**
PERKEMBANGAN IUPJL TAHUN 2019
- 39 TABEL 3.3**
PERKEMBANGAN IUPK-SYLVOPASTURA TAHUN 2019
- 40 TABEL 3.4**
PERKEMBANGAN IUPHHBK TAHUN 2019
- 41 TABEL 3.5**
PRODUKSI HHBK TAHUN 2019
- 42 TABEL 4.1**
PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) KAPASITAS IZIN DI ATAS 6000 M3/TAHUN TAHUN 2014-2019
- 43 TABEL 4.2**
KAPASITAS IZIN PRODUKSI IUPHHK KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN TAHUN 2014-2019
- 44 TABEL 4.3**
INVESTASI IUPHHK KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN TAHUN 2014-2019
- 45 TABEL 4.4**
TENAGA KERJA IUPHHK KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN TAHUN 2014-2019
- 46 TABEL 4.5**
REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER SUMBER BAHAN BAKU TAHUN 2014-2019
- 47 TABEL 4.6**
REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 48 TABEL 4.7**
REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU IUPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER JENIS PRODUK TAHUN 2014-2019
- 49 TABEL 4.8**
REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU IUPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 50 TABEL 4.9**
PRODUKSI KAYU LAPIS DAN LAMINATED VENEER LUMBER (LVL) DARI IUPHHK KAPASITAS DIATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019

- 51 TABEL 4.10**
PRODUKSI VENEER DARI IUIPHHK KAPASITAS DIATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 52 TABEL 4.11**
PRODUKSI KAYU GERGAJIAN DARI IUIPHHK KAPASITAS DIATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 53 TABEL 4.12**
PRODUKSI SERPIH KAYU DARI IUIPHHK KAPASITAS DIATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 54 TABEL 4.13**
PRODUKSI PULP DARI IUIPHHK KAPASITAS DIATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 55 TABEL 4.14**
PERKEMBANGAN PRODUKSI SELURUH JENIS KAYU OLAHAN PER TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2014 - 2019
- 56 TABEL 4.15**
NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER JENIS PRODUK TAHUN 2014-2019
- 57 TABEL 4.16**
NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER PROVINSI TAHUN 2014-2019
- 58 TABEL 4.17**
EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER NEGARA TUJUAN TAHUN 2014-2019
- 59 TABEL 5.1**
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2014-2019

RINGKASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.

Hingga Tahun 2019 tercatat luas hutan produksi Indonesia mencapai 68,97 juta Ha dengan rincian hutan produksi tetap (HP) 29,36 juta Ha, hutan produksi terbatas (HPT) 26,77 juta ha, dan hutan produksi konversi (HPK) 12,84 juta ha.



Sejak tahun 2015 Ditjen PHPL bertekad bulat menyelamatkan hutan produksi Indonesia dengan mencanangkan perubahan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Dengan semangat perubahan ini, Ditjen PHPL menetapkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi dengan melakukan :

1. Peningkatan akses masyarakat dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan kewajiban mengalokasikan 20% areal izin dalam bentuk usaha kemitraan dengan masyarakat;
2. Kontribusi terhadap NDC (*Nationally Determined Contribution*) melalui pembentukan unit manajemen multibisnis KPHP yang sekaligus sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penerapan RIL (Reduce Impact Logging) oleh pemegang izin;

3. Penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan sistem informasi;
4. Peningkatan daya saing produk dan ekspor dengan melakukan berbagai upaya keberterimaan produk di pasar global;
5. Peningkatan PNBP dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

Konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi telah merubah paradigma dari *timber management* menjadi *forest management*, dan dari orientasi korporasi menjadi orientasi multi pelaku usaha. Sejumlah regulasi telah diterbitkan terkait pemberian akses legal kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan produksi, diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH, yang memberikan ruang bagi KPHP untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak (perorangan/kelompok masyarakat setempat, BUM Desa, koperasi setempat, UMKM, BUMN, BUMD, BUMSI), yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengoptimalkan sumber daya hutan (potensi khas masing-masing KPHP) yang berbasis usaha lokal masyarakat. Dengan fokus pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat lokal di wilayah KPHP dan penerapan strategi **multibisnis**, **multikomoditas**, dan **multistakeholder** dapat mendorong percepatan kemandirian KPHP, yang diawali dengan memproduksi barang dan jasa secara lestari.

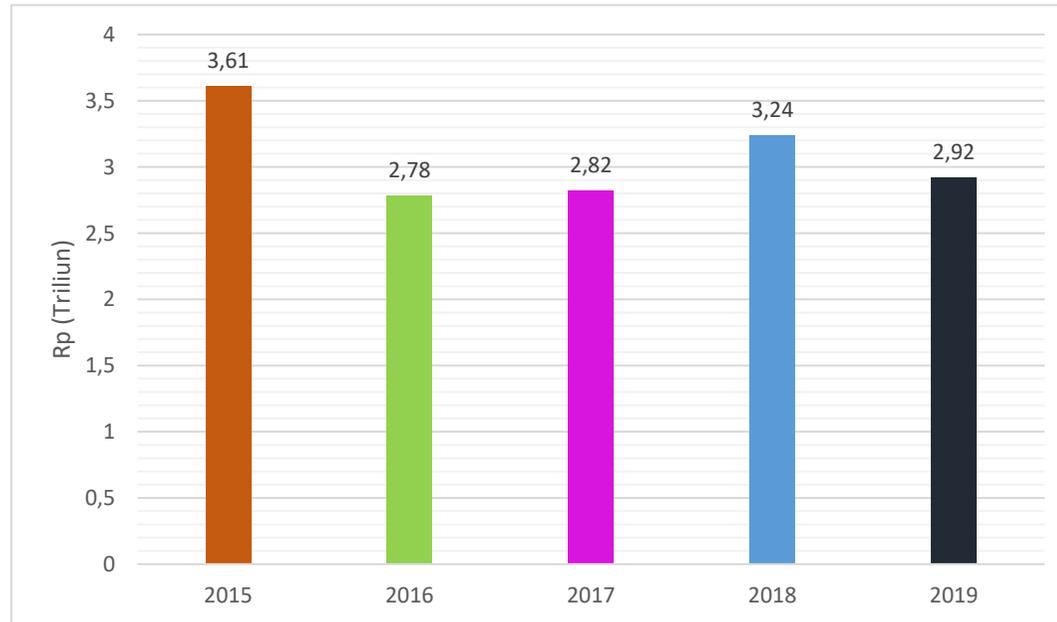
Faktor penentu keberhasilan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan adalah peran dan keterkaitan antara pelaku pengelola hutan. Pelaku tersebut diilustrasikan sebagai tiga pilar penggerak pembangunan yaitu masyarakat (*civil society*), pengusaha (*private sector*) dan pemerintah (*government*), dimana pemerintah sebagai penggerak bagi sektor swasta dan melakukan pemberdayaan untuk masyarakat, sedangkan sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra.

Pada tahun 2019 Ditjen PHPL telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara, berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nilai ekspor produk industri kehutanan, serta untuk meningkatkan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari, dengan meningkatkan jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi, dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Target PNBP pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 2,919 Triliun (93,34%), Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Menurunnya produksi kayu bulat baik dari hutan alam maupun hutan tanaman yaitu
 - a) Produksi kayu bulat dari hutan alam pada tahun 2019 sebanyak 6,18 juta M3 turun $\pm 11,9$ % dari tahun 2018 sebanyak 7,02 juta M3.
 - b) Produksi kayu bulat dari hutan tanaman pada tahun 2019 sebanyak 40,02 juta M3 turun $\pm 2,3$ % dari tahun 2018 sebanyak 40,95 juta M3.

2. Kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis terhadap pemegang izin yang diterbitkan di luar Ditjen PHPL tidak dianggarkan sehingga pemegang izin tidak mengetahui kewajibannya untuk melakukan pembayaran PNBP.
3. PNBP dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudah tidak dipungut.



Grafik 1. Realisasi PNBP Sektor PHPL Tahun 2015 s.d. 2019

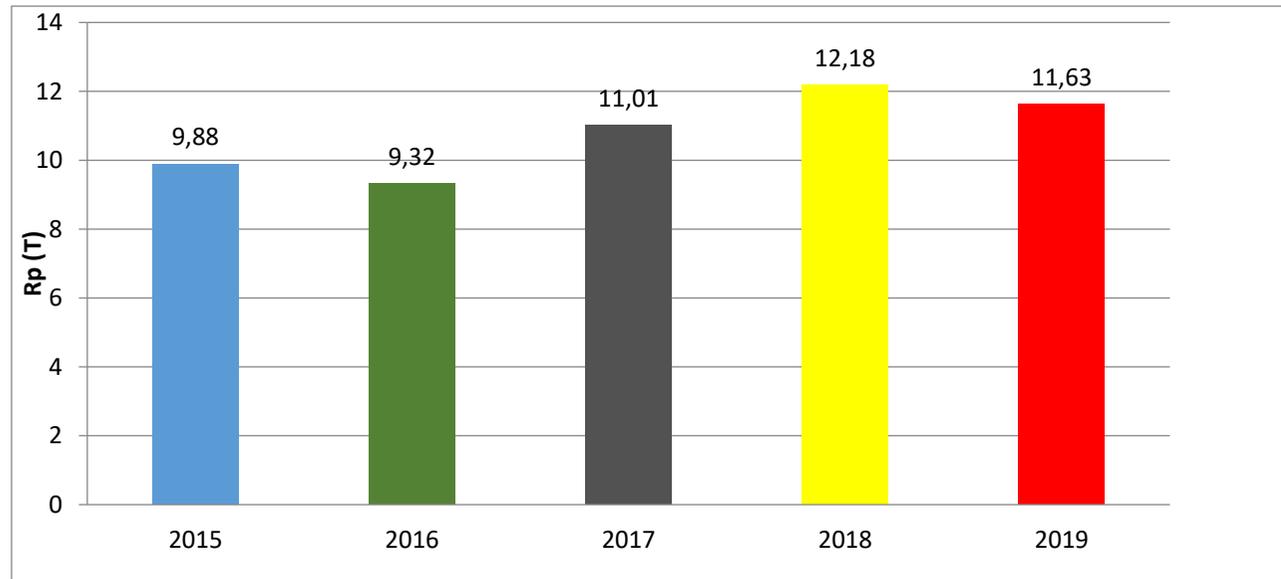
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSDH, DR dan IIUPHH di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 (yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/MenLHKSetjen/2015), tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Untuk meningkatkan PNBP sebagaimana diuraikan di atas, Ditjen PHPL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Dengan SIPNBP, Wajib Bayar dapat segera melakukan

proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya.

SIPNBP merupakan sistem informasi PNBP Sumber Daya Alam pertama yang terintegrasi dengan SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan. Keberhasilan meningkatkan sumbangan PNBP juga tidak terlepas dari peran SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang telah terintegrasi dengan SIPNBP. Saat ini SIPUHH telah menjadi sarana utama pelayanan publik bidang penatausahaan hasil hutan yang berlangsung 24 jam penuh, memfasilitasi lebih dari 5.534 pelaku usaha yang terkait pemanfaatan hasil hutan, simpul distribusi dan industri primer pengolahan kayu.

Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2019 sebesar USD 9,28 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 11,63 Miliar (20,2%).



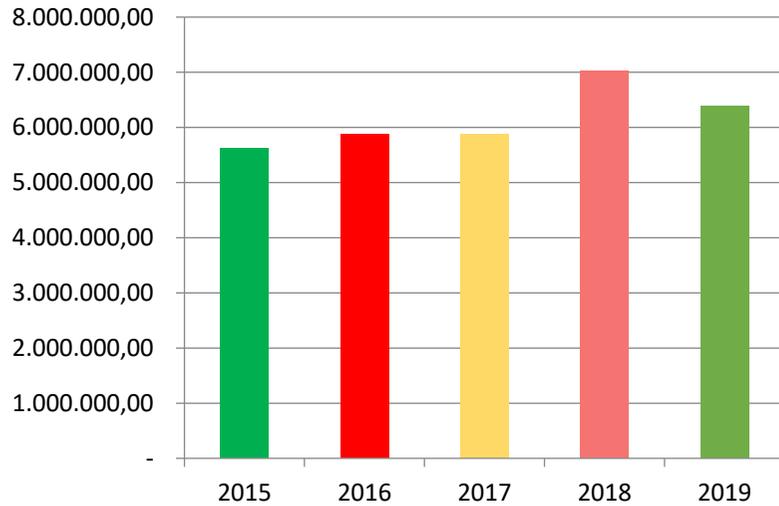
Grafik 2. Perkembangan Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2015 s.d. 2019

Penyebab Penurunan Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2019 antara lain :

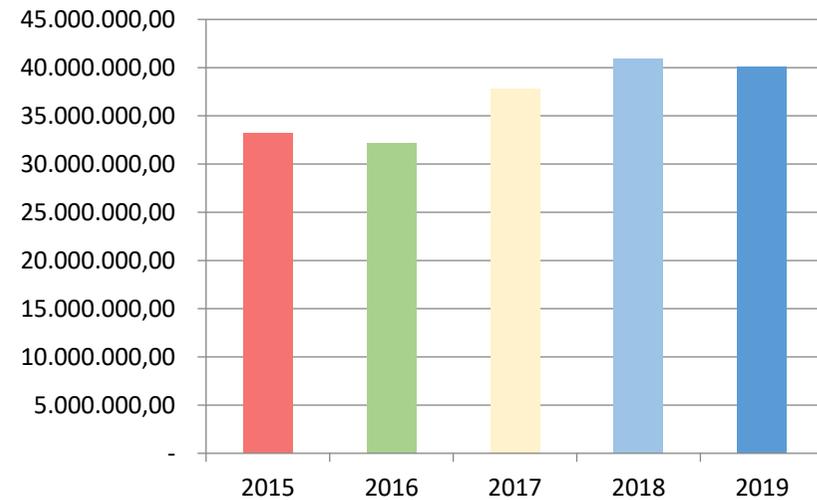
1. Perlambatan pergerakan perdagangan disebabkan perang dagang Amerika vs China
2. Berkembangnya pasar di Vietnam, Laos, dan beberapa negara Afrika dengan pengembangan strategi pasar Cina strategi One Belt On Road (OBOR) sehingga pengucuran dana buyer lebih kepada negara negara tersebut (terdekat), beberapa perusahaan di Indonesia yang biasanya menyediakan bahan baku dan pengerjaan produk jadi (dari primer – sekunder - tersier) berubah hanya sebatas produk sekunder (upah gesek) finishing dilakukan di negara tujuan ekspor.

Tingginya capaian kinerja nilai ekspor produk industri kehutanan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, dimana terdapat produk industri kehutanan yang sebelumnya termasuk dalam kelompok B (tidak wajib dilengkapi dokumen V-Legal), maka mulai tanggal 15 Mei 2017 termasuk dalam kelompok A (wajib dilengkapi dokumen V-Legal). Kerjasama Indonesia dengan komunitas negara yang tergabung dalam Uni Eropa mencapai puncaknya dengan diberlakukannya FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) License pada tanggal 15 November 2016 yang ditandai dengan kegiatan *first shipment* ke negara anggota Uni Eropa. Dokumen V-Legal/dokumen FLEGT yang diterbitkan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) dikirimkan melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikelola Ditjen PHPL. Dengan adanya SILK, diharapkan kegiatan ekspor produk industri kehutanan yang bersertifikat semakin meningkat.

Pengelolaan hutan produksi terutama produksi kayu bulat IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI pada tahun 2019, produksi kayu bulat IUPHHK-HA pada tahun 2019 mencapai 6,18 Juta m³ IUPHHK-HTI pada tahun 2019 mencapai 40.02 Juta m³.

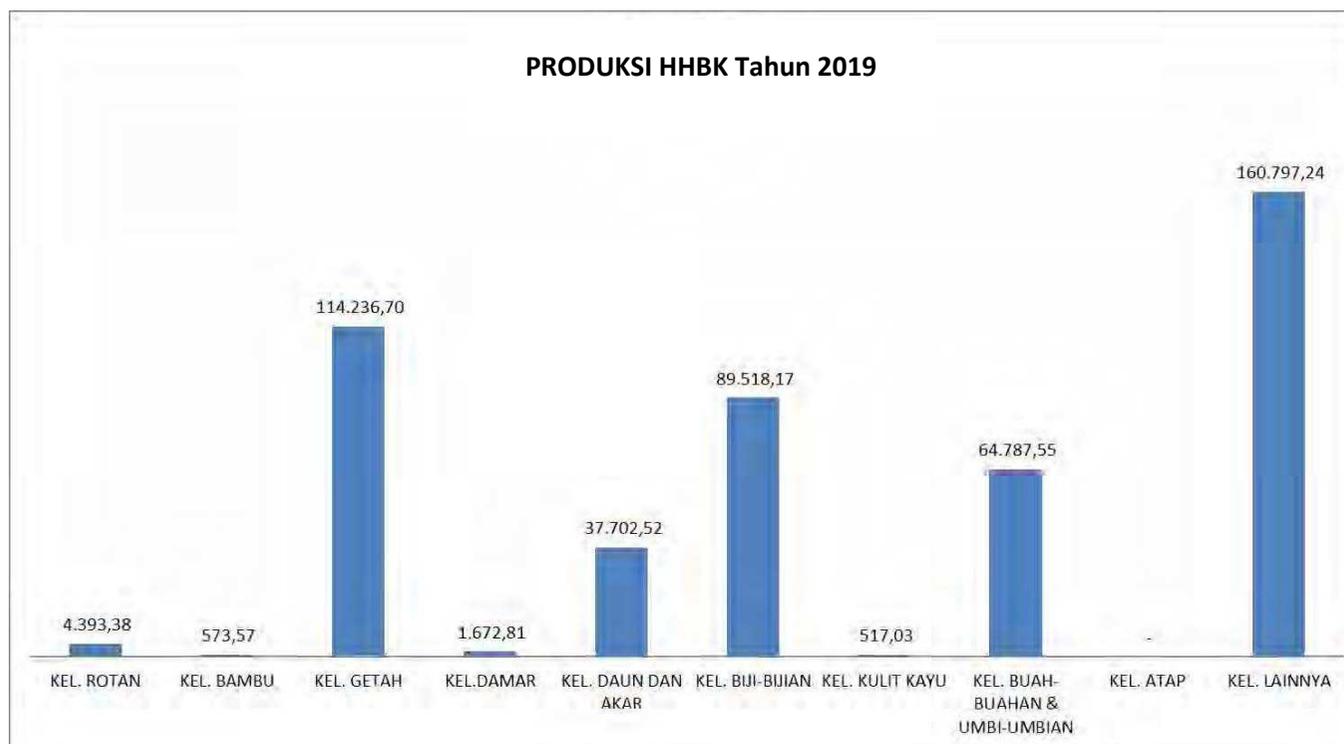


Grafik 3. Perkembangan Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA Tahun 2015 s.d. 2019



Grafik 4 Perkembangan Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HT Tahun 2015 s.d. 2019

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) tahun 2019 masih didominasi oleh HHBK dari kelompok getah dengan produksi mencapai 114.236 ton. Jenis getah yang diproduksi umumnya adalah getah pinus dan getah karet. Jenis batang didominasi oleh bambu dan rotan, Jenis resin didominasi oleh kemedangan, damar kopal, dan kemenyan. Selain itu masih terdapat kelompok HHBK lainnya seperti biji-bijian, umbi, buah-buahan, dan kelompok lainnya



Grafik 4 Perkembangan Produksi HHBK Tahun 2019

LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI INDONESIA (ha)

BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

Legenda

■ HPT ■ HP ■ HPK

Nangroe Aceh Darussalam ■ 145.178,34 ■ 549.794,88 ■ 15.374,69 Total 710.347,91	Lampung ■ 33.358,00 ■ 191.732,00 ■ - Total 225.090,00	Jawa Tengah ■ 183.930,00 ■ 362.360,00 ■ - Total 546.290,00	Kalimantan Barat ■ 2.132.398,00 ■ 2.127.365,00 ■ 197.918,00 Total 4.457.681,00	Sulawesi Barat ■ 330.700,00 ■ 71.859,00 ■ 22.597,00 Total 425.156,00
Sumatera Utara ■ 641.769,00 ■ 704.452,00 ■ 75.684,00 Total 1.421.905,00	Kep. Riau ■ 118.832,99 ■ 78.830,62 ■ 82.071,11 Total 279.734,72	Jawa Timur ■ - ■ 782.772,00 ■ - Total 782.772,00	Kalimantan Selatan ■ 126.660,00 ■ 762.188,00 ■ 151.424,00 Total 1.040.272,00	Sulawesi Tenggara ■ 466.854,00 ■ 401.581,00 ■ 93.571,00 Total 962.006,00
Sumatera Barat ■ 233.211,00 ■ 360.608,00 ■ 187.629,00 Total 781.448,00	Kep. Bangka Belitung ■ - ■ 442.051,00 ■ 693,00 Total 442.744,00	Bali ■ 6.719,26 ■ 1.907,10 ■ - Total 8.626,36	Kalimantan Tengah ■ 3.317.461 ■ 3.881.817 ■ 2.543.535 Total 9.742.813,00	Maluku ■ 894.258,00 ■ 643.699,00 ■ 1.324.866,00 Total 2.862.823,00
Riau ■ 1.017.318,00 ■ 2.339.578,00 ■ 1.185.433,00 Total 4.542.329,00	Banten ■ 49.439,00 ■ 26.998,00 ■ - Total 76.437,00	Nusa Tenggara Barat ■ 286.700,00 ■ 150.740,00 ■ - Total 437.440,00	Sulawesi Utara ■ 208.927,00 ■ 208.927,00 ■ 14.696,00 Total 432.550,00	Maluku Utara ■ 666.851,00 ■ 481.730,00 ■ 564.082,00 Total 1.712.663,00
Jambi ■ 258.285,00 ■ 963.792,00 ■ 11.399,00 Total 1.233.476,00	DKI Jakarta ■ - ■ 158,35 ■ - Total 158,35	Nusa Tenggara Timur ■ 169.707,00 ■ 288.214,00 ■ 78.494,00 Total 536.415,00	Gorontalo ■ 251.097,00 ■ 89.879,00 ■ 82.431,00 Total 423.407,00	Papua ■ 5.961.240,00 ■ 4.739.327,00 ■ 4.116.365,00 Total 14.816.932,00
Sumatera Selatan ■ 213.918,00 ■ 1.712.819,00 ■ 160.996,00 Total 2.087.733,00	Jawa Barat ■ 190.152,00 ■ 202.965,00 ■ - Total 393.117,00	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ■ 5.045.164,45 ■ 4.022.293,32 ■ 211.575,88 Total 9.279.033,65	Sulawesi Tengah ■ 1.390.971,00 ■ 401.814,00 ■ 217.322,00 Total 2.010.107,00	Papua Barat ■ 1.778.480,00 ■ 2.188.160,00 ■ 1.474.650,00 Total 5.441.290,00
Bengkulu ■ 173.280,00 ■ 25.873,00 ■ 11.763,00 Total 210.916,00	DI Yogyakarta ■ - ■ 13.851,28 ■ - Total 13.851,28		Sulawesi Selatan ■ 479.518,00 ■ 140.036,00 ■ 16.412,00 Total 635.966,00	

CATATAN

Luas kawasan hutan berfungsi didasarkan/mencuplik pada lembar SK kawasan hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

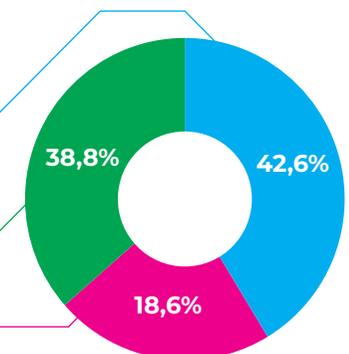
Sumber: Dit KPHP, Ditjen PHPL dan Ditjen PKTL

JUMLAH TOTAL

29.360.171,55

26.772.377,04

12.840.981,68



PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2020

(SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019)

68,80 HUTAN PRODUKSI
(HPT,HP,HPK)
JT HA 68,80 JT HA

34,62 BELUM DIBEBANI IZIN
JT HA 34,18 JT HA

34,18 TELAH DIBEBANI IZIN
JT HA 34,18 JT HA



9,88 JT Ha
PIPIB



7,69 JT Ha
KPH YANG TELAH
DISAHKAN RPHJP



7,01 JT Ha
ARAHAN
PEMANFAATAN



10,04 JT Ha
HPK



3,55 JT Ha

(HKm, HD, HTR, Kemitraan)
**ALOKASI KELOLA
SOSIAL**



3,46 JT Ha

**PEMANFAATAN
MELALUI IUPHHK**
HA = 1,58 JT HA
RE = 1,13 JT HA
HTI = 0,75 JT HA



TABEL 1.1
LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

No	Provinsi	SK	Tanggal	HPT	HP	HPK	Luas Total
1	Nangroe Aceh Darussalam	580/MENLHK/SETJEN/S ET.1/12/2018	07-Dec-18	145.178,34	549.794,88	15.374,69	710.347,91
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24 Juni 2014	641.769,00	704.452,00	75.684,00	1.421.905,00
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15 Januari 2013	233.211,00	360.608,00	187.629,00	781.448,00
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07 Desember 2016	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	4.542.329,00
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29 September 2014	258.285,00	963.792,00	11.399,00	1.233.476,00
6	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 & 190/MenLHK/Setjen/PLA.0/4/2018	17 Juni /2016 & 20 April 2018	213.918,00	1.712.819,00	160.996,00	2.087.733,00
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	173.280,00	25.873,00	11.763,00	210.916,00
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	33.358,00	191.732,00	0,00	225.090,00
9	Kep. Riau	76/MenLHK-II/2015 & 272/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2018	06/03/2015 & 6 Juni 2018	118.832,99	78.830,62	82.071,11	279.734,72
10	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	442.051,00	693,00	442.744,00
11	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	49.439,00	26.998,00	0,00	76.437,00
12	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	0,00	158,35	0,00	158,35
13	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	190.152,00	202.965,00	0,00	393.117,00
14	DI Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	0,00	13.851,28	0,00	13.851,28
15	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01 Oktober 2004	183.930,00	362.360,00	0,00	546.290,00
16	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21 Juli 2011	0,00	782.772,00	0,00	782.772,00
17	B a l i	433/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	6.719,26	1.907,10	0,00	8.626,36
18	Nusa Tenggara Barat	598/Menhut-II/2009 jo. 270/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	02 Oktober 2009 jo 05 Juni 2017	286.700,00	150.740,00	0,00	437.440,00
19	Nusa Tenggara Timur	357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016	11 Mei 2016	169.707,00	288.214,00	78.494,00	536.415,00
20	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014&278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 &254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018,136/M ENLHK/SETJEN/PLA.2/2.2019	29 Agustus 2014 & 9 Juni 2017&30 Mei 2018, 13 Februari 2019	5.045.164,45	4.022.293,32	211.575,88	9.279.033,65
21	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02 September 2014	2.132.398,00	2.127.365,00	197.918,00	4.457.681,00
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.040.272,00
23	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25 September 2012	3.317.461	3.881.817	2.543.535	9.742.813,00
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02 September 2014	208.927,00	208.927,00	14.696,00	432.550,00
25	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	251.097,00	89.879,00	82.431,00	423.407,00
26	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29 September 2014	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	2.010.107,00
27	Sulawesi Selatan	362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019	28 Mei 2019	479.518,00	140.036,00	16.412,00	635.966,00
28	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29 September 2014	330.700,00	71.859,00	22.597,00	425.156,00
29	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09 Agustus 2011	466.854,00	401.581,00	93.571,00	962.006,00
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29 September 2014	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	2.862.823,00
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01 Mei 2013	666.851,00	481.730,00	564.082,00	1.712.663,00
32	Papua	782/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	14.816.932,00
33	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22 September 2014	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	5.441.290,00
JUMLAH				26.772.377,04	29.360.171,55	12.840.981,68	68.973.530,27

Catatan :

Luas kawasan hutan berfungsi didasarkan/mencuplik pada lembar SK kawasan hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber: Dit KPHP, Ditjen PHPL dan Ditjen PKTL

LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEKANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HUTAN (ha)

(Berdasarkan SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019)

Legenda

■ Alokasi Pemanfaatan Melalui HKm, HD, HTR, HA & HR

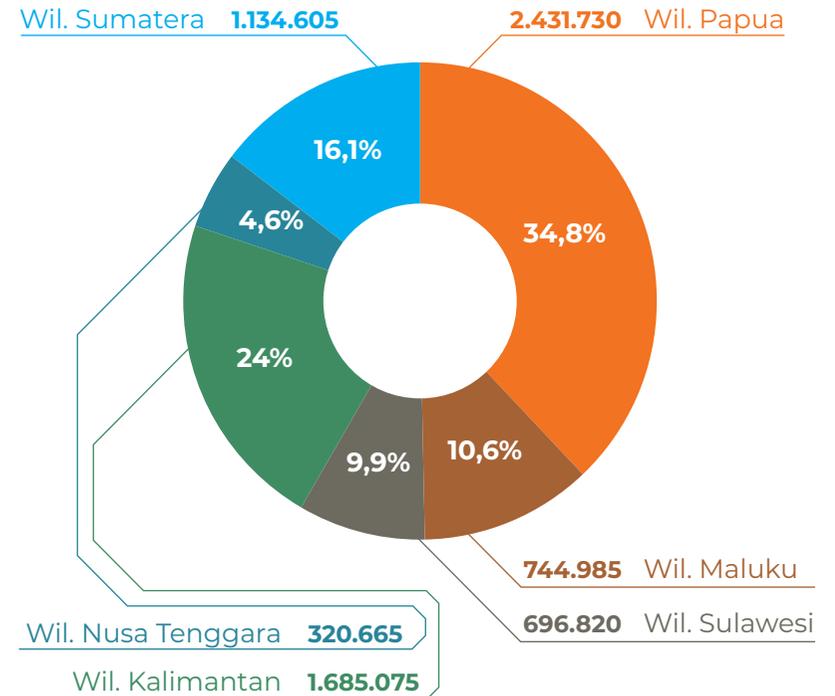
Alokasi Pemanfaatan Melalui UPHHK

▲ IUPHHK-HA ● IUPHHK-RE

◆ Areal Lahan Usaha Pengganti (landswap) untuk IUPHHK-HTI

★ Jumlah Alokasi Untuk IUPHHK ■ Total

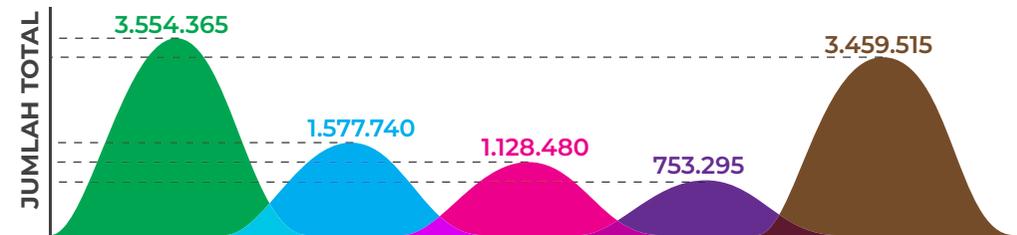
Provinsi	Alokasi Pemanfaatan Melalui HKm, HD, HTR, HA & HR	Alokasi Pemanfaatan Melalui UPHHK	Areal Lahan Usaha Pengganti (landswap) untuk IUPHHK-HTI	Jumlah Alokasi Untuk IUPHHK	Total
Nangroe Aceh Darussalam	32.100	-	13.760	13.760	45.860
Kep. Bangka Belitung	69.855	-	-	16.235	86.090
Sulawesi Utara	21.580	61.040	-	61.040	82.620
Papua Barat	131.960	134.310	-	181.335	313.295
Sumatera Utara	24.675	-	6.500	6.500	31.175
Kep. Riau	91.525	-	-	-	91.525
Sulawesi Tengah	119.475	146.330	-	146.330	265.805
Papua	909.650	492.320	582.245	1.208.785	2.118.435
Sumatera Barat	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	25.790	-	53.545	53.545	79.335
Sulawesi Selatan	2.580	-	8.595	8.595	11.175
Riau	650.560	-	52.430	52.430	702.990
Nusa Tenggara Timur	209.150	-	-	32.180	241.330
Sulawesi Tenggara	102.230	31.270	137.075	195.790	298.020
Jambi	60.120	-	23.900	59.800	119.920
Kalimantan Barat	504.120	159.050	90.950	489.980	994.100
Gorontalo	5.495	18.430	-	24.865	30.360
Sumatera Selatan	13.000	-	-	8.230	21.230
Kalimantan Tengah	150.380	12.990	-	58.415	208.795
Sulawesi Barat	8.840	-	-	-	8.840
Bengkulu	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	17.140	-	-	15.270	32.410
Maluku	80.015	288.020	69.385	447.245	527.260
Lampung	35.815	-	-	-	35.815
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	229.750	104.080	79.270	220.020	449.770
Maluku Utara	58.560	129.900	10.825	159.165	217.725



CATATAN

HP dalam areal KPH yang telah disahkan RPHJP-nya seluas 7.694.240 ha
 Blok Pemberdayaan Masyarakat di KPHP yang telah disahkan RPHJP-nya seluas 4.325.120 ha

HP dalam PIPPIB (2019) seluas 9.882.165 ha



TABEL 1.2
LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEKANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HUTAN
(Berdasarkan SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019)

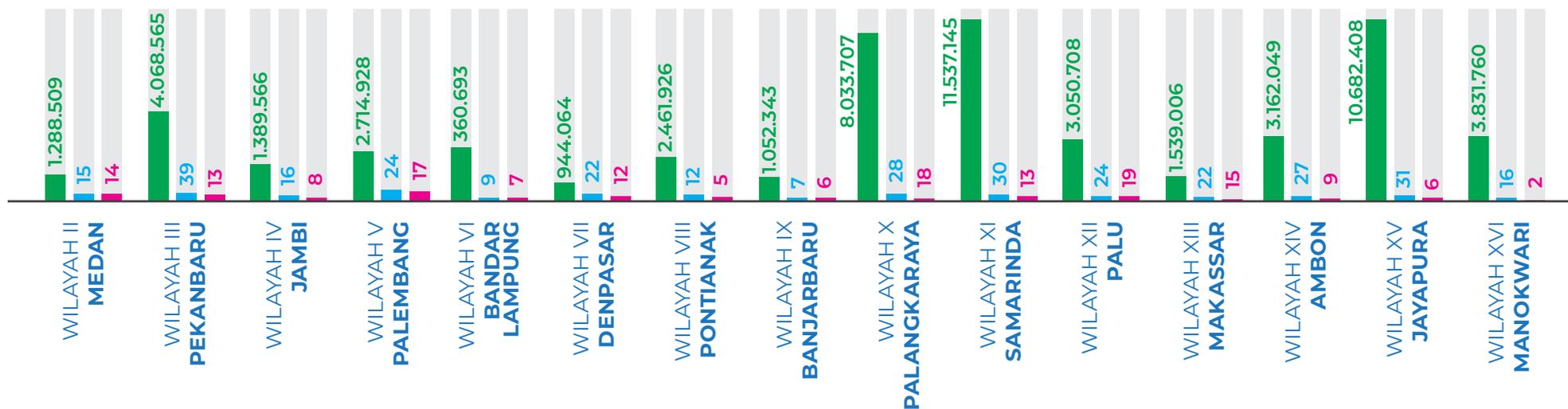
NO.	PROVINSI	ALOKASI PEMANFAATAN MELALUI HKm, HD, HTR, HA & HR	ALOKASI PEMANFAATAN MELALUI UPHHK (HA)				JUMLAH (3+7)
			IUPHHK-HA	IUPHHK-RE	Areal Lahan Usaha Pengganti (landswap) untuk IUPHHK-HTI	JUMLAH ALOKASI UNTUK IUPHHK (4+5+6)	
		(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)
1	Aceh	32.100	0	13.760	0	13.760	45.860
2	Sumatera Utara	24.675	0	6.500	0	6.500	31.175
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0
4	Riau	650.560	0	52.430	0	52.430	702.990
5	Jambi	60.120	0	23.900	35.900	59.800	119.920
6	Sumatera Selatan	13.000	0	0	8.230	8.230	21.230
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	35.815	0	0	0	0	35.815
9	Kep. Bangka Belitung	69.855	0	0	16.235	16.235	86.090
10	Kep. Riau	91.525	0	0	0	0	91.525
	Wilayah Sumatera	977.650	0	96.590	60.365	156.955	1.134.605
11	Nusa Tenggara Barat	25.790	0	53.545	0	53.545	79.335
12	Nusa Tenggara Timur	209.150	0	0	32.180	32.180	241.330
	Wilayah Nusa Tenggara	234.940	0	53.545	32.180	85.725	320.665
13	Kalimantan Barat	504.120	159.050	90.950	239.980	489.980	994.100
14	Kalimantan Tengah	150.380	12.990	0	45.425	58.415	208.795
15	Kalimantan Selatan	17.140	0	0	15.270	15.270	32.410
16	Kalimantan Timur & Utara	229.750	104.080	79.270	36.670	220.020	449.770
	Wilayah Kalimantan	901.390	276.120	170.220	337.345	783.685	1.685.075
17	Sulawesi Utara	21.580	61.040	0	0	61.040	82.620
18	Sulawesi Tengah	119.475	146.330	0	0	146.330	265.805
19	Sulawesi Selatan	2.580	0	8.595	0	8.595	11.175
20	Sulawesi Tenggara	102.230	31.270	137.075	27.445	195.790	298.020
21	Gorontalo	5.495	18.430	0	6.435	24.865	30.360
22	Sulawesi Barat	8.840	0	0	0	0	8.840
	Wilayah Sulawesi	260.200	257.070	145.670	33.880	436.620	696.820
23	Maluku	80.015	288.020	69.385	89.840	447.245	527.260
24	Maluku Utara	58.560	129.900	10.825	18.440	159.165	217.725
	Wilayah Maluku	138.575	417.920	80.210	108.280	606.410	744.985
25	Papua Barat	131.960	134.310	0	47.025	181.335	313.295
26	Papua	909.650	492.320	582.245	134.220	1.208.785	2.118.435
	Wilayah Papua	1.041.610	626.630	582.245	181.245	1.390.120	2.431.730
	Total	3.554.365	1.577.740	1.128.480	753.295	3.459.515	7.013.880

PENETAPAN WILAYAH KPHP PER PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Legenda

■ Luas (ha) ● Unit KPHP ▲ RPHJP

Sumatera Utara ■ 1.288.509 ● 15 ▲ 14	Kep. Bangka Belitung ■ 669.542 ● 10 ▲ 6	Kalimantan Barat ■ 2.461.926 ● 12 ▲ 5	Gorontalo ■ 306.711 ● 5 ▲ 4	Sulawesi Barat ■ 401.678 ● 4 ▲ 4
Riau ■ 3.457.494 ● 30 ▲ 6	Lampung ■ 230.068 ● 7 ▲ 5	Kalimantan Selatan ■ 1.052.343 ● 7 ▲ 6	Sulawesi Utara ■ 323.923 ● 3 ▲ 2	Maluku ■ 1.923.696 ● 16 ▲ 5
Sumatera Barat ■ 351.695 ● 4 ▲ 4	Bengkulu ■ 130.625 ● 2 ▲ 2	Kalimantan Tengah ■ 8.033.707 ● 28 ▲ 18	Sulawesi Tengah ■ 2.420.074 ● 16 ▲ 13	Maluku Utara ■ 1.238.353 ● 11 ▲ 4
Kepulauan Riau ■ 259.376 ● 5 ▲ 3	D.I. Yogyakarta ■ 15.725 ● 1 ▲ 1	Kalimantan Timur ■ 7.209.590 ● 18 ▲ 8	Sulawesi Tenggara ■ 936.502 ● 15 ▲ 8	Papua ■ 10.682.408 ● 31 ▲ 6
Jambi ■ 1.389.566 ● 16 ▲ 8	Nusa Tenggara Barat ■ 440.746 ● 12 ▲ 8	Kalimantan Utara ■ 4.327.555 ● 12 ▲ 5	Sulawesi Selatan ■ 200.826 ● 3 ▲ 3	Papua Barat ■ 3.831.760 ● 16 ▲ 2
Sumatera Selatan ■ 2.045.386 ● 14 ▲ 11	Nusa Tenggara Timur ■ 487.593 ● 9 ▲ 3			



JUMLAH TOTAL

56.117.377

322

164

TABEL 1.3
PENETAPAN WILAYAH KPHP SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PPHL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN	
1	WIL. II MEDAN	1 Sumatera Utara	1	Mandailing Natal	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	SK.332/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010	159.166	Tahun 2017 (Predikat Penilaian : Baik)	32	SK.199/Menhut-II/Reg.1/2014	29 Januari 2014	KPHP Model
			2	Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat	KPHP Unit XVII (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	86.555			SK.1242/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	26 Maret 2018	
			3	Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan	KPHP Unit XX (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	88.931			SK.1230/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	23 Maret 2018	
			4	Tapanuli Selatan	KPHP Unit XXVII Tapanuli Selatan	SK.637/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	38.071			SK.788/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	15 Februari 2018	
			5	Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal	KPHP Unit XXVIII (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	127.758			SK.3185/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2018	18 Mei 2018	
			6	Padang Lawas dan Padang Lawas Utara	KPHP Unit XXXI (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	270.460			SK.3194/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019	4 April 2019	
			7	Langkat	KPHP Unit I	SK.831/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	69.878			SK.6888/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017	22 Desember 2017	
			8	Simalungun	KPHP Unit XII	SK.831/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	56.223			SK.6101/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2017	10 November 2017	
			9	Pakpak Bharat	KPHP Unit XV	SK.831/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	89.851			SK.289/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	2 Februari 2018	
			10	Labuhan Batu Utara	KPHP Unit III	SK.475/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	28.145			SK.4961/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	21 Mei 2019	
			11	Labuhan Batu Selatan	KPHP Unit XI	SK.475/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	42.052			SK.5295/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	31 Mei 2019	
			12	Deli Serdang	KPHP Unit V	SK.723/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	37.771			SK.1513/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	9 April 2018	
			13	Simalungun	KPHP Unit VI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	45.638			SK.1224/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2019	6 Februari 2019	
			14	Tapanuli Utara	KPHP Unit XXI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	38.277			SK.4962/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	21 Mei 2019	
						15	KPHP Unit XXXIII Gunung Sitoli	SK.723/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	109.733			Proses perbaikan RPHJP
						Jumlah 1	1.288.509	32				
2	WIL. III PEKANBARU	2 Riau	16	Kampar	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri	SK.640/Menhut-II/2011 tgl 7 November 2011	143.783		20	SK.7204/Menhut-II/Reg.1/2014	3 Desember 2014	KPHP Model
			17	Provinsi	KPHP Unit IX Minas Tahura	SK.765/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	146.734		45	SK.280/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	KPHP Model
			18	Provinsi	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	SK.509/Menhut-II/2010 tgl 21 September 2010	512.280	Tahun 2015 (Predikat Penilaian : Sedang)	147	SK.7565/Menhut-II/Reg.I-1/2014	16 Desember 2014	KPHP Model

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
			19	Kepulauan Meranti	KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi	SK.343/Menhut-II/2011 tgl 28 Juni 2011		65	SK.277/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	KPHP Model
			20	Pelalawan	KPHP Unit XX Nilo	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015					
			21	Pelalawan	KPHP Unit XXI Sorek	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015					
			22	Bengkalis	KPHP Unit V Bengkalis	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015					
			23	Siak	KPHP Unit VII Perawang	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015					
			24	Rokan Hulu	KPHP Unit XIV Rokan	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015			SK.6329/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2019	18 Juli 2019	
			25	Indragiri Hulu	KPHP Unit XXX Serangge Sengkilo	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015					
			26	Rokan Hilir, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan	KPHP Unit I	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			27	Rokan Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Rokan Hulu	KPHP Unit II	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			28	Kota Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir	KPHP Unit III	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			29	Bengkalis	KPHP Unit IV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			30	Siak, Bengkalis	KPHP Unit VI	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			31	Rokan Hilir, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Rokan Hilir, Rokan Hulu	KPHP Unit XII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			32	Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan	KPHP Unit XIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			33	Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis	KPHP Unit XV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			34	Kepulauan Meranti	KPHP Unit XXIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			35	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Tanjung Jabung Barat	KPHP Unit XXIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			36	Kepulauan Meranti	KPHP Unit XXV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			37	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan	KPHP Unit XXVII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			38	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan	KPHP Unit XXVIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					
			39	Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan	KPHP Unit XXXII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN					
				40	KPHP Unit VIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	105.279				Belum menyusun RPHJP					
				41	KPHP Unit X	SK.736/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	64.885				Belum menyusun RPHJP					
				42	KPHP Unit XI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	29.812				Belum menyusun RPHJP					
				43	KPHP Unit XIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	72.739				Belum menyusun RPHJP					
			Kampar	44	KPHP Unit XVII Muara Mahat	SK.736/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	27.330				SK.4984/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	24 Mei 2019				
				45	KPHP Unit XXVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	117.912				Belum menyusun RPHJP					
				Jumlah 2		3.457.494		277								
		3 Sumatera Barat		46	Dharmasraya	KPHP Unit VIII Dharmasraya	SK.695/Menhut-II/2013 tgl 21 Oktober 2013	33.550				SK.6969/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019	21 Agustus 2019	KPHP Model		
				47	Pesisir Selatan	KPHP Unit XI Pesisir Selatan	SK.696/Menhut-II/2013 tgl 21 Oktober 2013	59.928	5			SK.278/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	KPHP Model		
				48	Kepulauan Mentawai	KPHP Unit X	SK.724/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	123.467				SK.5224/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	29 Mei 2019			
				49	Kepulauan Mentawai	KPHP Unit XI	SK.724/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	134.750				SK.1990/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	20 April 2018			
				Jumlah 3		351.695		5								
		4 Kepulauan Riau		50	Lingga	KPHP Unit III Lingga	SK.634/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	98.752				Sudah menyusun RPHJP				
				51	Bintan	KPHP Unit IV Bintan Tanjung Pinang	SK.634/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	46.756				SK.3192/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019	4 April 2019			
				52	Karimun	KPHP Unit I Karimun	SK.452/MenLHK/Setjen/PLA .0/6/2016 tgl 17 Juni 2016	29.633				SK.5916/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2019	21 Juni 2019			
				53	Natuna	KPHP Unit V Natuna	SK.844/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	61.403				SK.6185/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2019	8 Juli 2019			
				54	Anambas	KPHP Unit VI Anambas	SK.731/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	22.832				Proses perbaikan RPHJP				
				Jumlah 4		259.376										
3	WIL IV. JAMBI	5	Jambi	55	Sarolangun	KPHP Unit VII Limau	SK.714/Menhut-II/2011 tgl 19 Desember 2011	121.102				Tahun 2017 (Predikat Penilaian : Baik)	SK.198/Menhut-II/Reg.1/2014	29 Januari 2014	KPHP Model	
				56	Merangin	KPHP Unit VI Hulu Landai LB Pekak	SK.43/Menhut-II/2012 tgl 2 Februari 2012	76.137					SK.321/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	7 Februari 2018	KPHP Model	
				57	Kerinci	KPHP Unit I Kerinci	SK.960/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	34.250					Tahun 2018 (Predikat Penilaian : Sedang)	SK.1983/MenLHK-KPHP/PKPHP/ PHL.0/4/2017	10 April 2017	KPHP Model
				58	Tebo	KPHP Unit IX Tebo Barat	SK.632/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	142.967					SK.2419/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	25 April 2018		

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
			59	Tebo	KPHP Unit X Tebo Timur	SK.632/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.4748/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018	13 Juli 2018	
			60	Sarolangun	KPHP Unit VIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.1450/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	3 April 2018	
			61	Batanghari, Tebo, Sarolangun, Musi Banyuasin	KPHP Unit XII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Belum menyusun RPHJP		
			62	Muaro Jambi	KPHP Unit XIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.8567/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	17 Desember 2018	
			63	Tanjung Jabung Timur	KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	SK.845/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Proses perbaikan RPHJP		
			64	Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat	KPHP Unit XV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Belum menyusun RPHJP		
			65	Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tebo	KPHP Unit XVI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Belum menyusun RPHJP		
			66	Bungo	KPHP Unit II Bungo	SK.732/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			SK.8568/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	17 Desember 2018	
			67		KPHP Unit III	SK.732/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Belum menyusun RPHJP		
			68		KPHP Unit IV	SK.732/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Belum menyusun RPHJP		
			69		KPHP Unit V	SK.732/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Belum menyusun RPHJP		
			70	Batanghari, Muaro Jambi	KPHP Unit XI	SK.732/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Proses perbaikan RPHJP		
					Jumlah 5	1.389.566					
4	WIL. V PALEMBANG	6	Sumatera Selatan	71	Provinsi	KPHP Unit XIV Benakat	SK.827/Menhut-II/2013		SK.7369/Menhut-II/Reg.I-1/2014	9 Desember 2014	KPHP Model
				72	Musi Rawas	KPHP Unit VI Lakitan	SK.790/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009		SK.255/Menhut-II/Reg.1/2014	6 Februari 2014	KPHP Model
				73	Musi Banyuasin	KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis	SK.789/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009		SK.3646/Menhut-II/Reg.I-1/2014	7 Mei 2014	KPHP Model
				74	Musi Banyuasin	KPHP Unit IV Meranti	SK.689/Menhut-II/2012 tgl 29 Nopember 2012		SK.7216/Menhut-II/Reg.I-1/2014	3 Desember 2014	KPHP Model
				75	Musi Rawas	KPHP Unit V Rawas	SK.688/Menhut-II/2012 tgl 29 Nopember 2012		SK.940/Menhut-II/Reg.I-1/2015	8 April 2015	KPHP Model
				76	Banyuasin	KPHP Unit II Lalan Sembilang	SK.621/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015		SK.3531/MenLHK-KPHP/PKPHP/ PHL.0/6/2017	12 Juni 2017	
				77	Ogan Komering Ilir	KPHP Unit XIV Suban Jeriji	SK.621/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015		SK.3614/MenLHK-KPHP/PKPHP/ PHL.0/6/2017	15 Juni 2017	
				78	Way Kanan, OKU Selatan, OKU Timur	KPHP Unit XIX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016		Belum menyusun RPHJP		
				79	OKU, OKU Timur	KPHP Unit XX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016		Belum menyusun RPHJP		

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN		
			80	OKI	KPHP Unit XXI	SK.833/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	44.592			SK.981/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	5 Maret 2018		
			81	OKI	KPHP Unit XXII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	91.392			SK.980/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	5 Maret 2018		
			82	OKI	KPHP Unit XXIII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	206.254			SK.306/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	5 Februari 2018		
			83	OKI	KPHP Unit XXIV	SK.833/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	407.604			SK.291/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	2 Februari 2018		
			84		KPHP Unit VIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	6.504			Belum menyusun RPHJP			
					Jumlah 6	2.045.386	33						
		7	Kep. Bangka Belitung	85	Belitung Timur	KPHP Unit XIII Gunung Duren	SK.764/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	58.235		22	SK.218/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2018	31 Januari 2018	KPHP Model
		86	Bangka Barat	KPHP Unit I Rambat Menduyung	SK.763/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	59.622			2	SK.207/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/1/2017	27 Januari 2017	KPHP Model	
		87	Bangka Tengah	KPHP Unit V Sungai Sembulan	SK.329/Menhut-II/2010	39.413			5	SK.194/Menhut-II/Reg.1/2014	29 Januari 2014	KPHP Model	
		88	Bangka	KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin	SK.962/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	34.938			10	SK.1088/MenLHK-KPHP/PKPHP/ PHL.0/3/2017	14 Maret 2017	KPHP Model	
		89		KPHP Unit II Jebu Bembang Antan	SK.626/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	103.539				SK.7223/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2019	2 September 2019		
		90	Bangka	KPHP Unit III Bubus Panca	SK.626/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	89.310				SK.9809/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2019	27 November 2019		
		91	Bangka Selatan	KPHP Unit VIII Muntai Palas	SK.626/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	171.189				Proses perbaikan RPHJP			
		92	Bangka Tengah	KPHP Unit VI Bangka Tengah	SK.846/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	27.199				Proses perbaikan RPHJP			
		93		KPHP Unit IX	SK.733/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	55.249				Belum menyusun RPHJP			
94		KPHP Unit XI	SK.733/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	30.848				Belum menyusun RPHJP					
		Jumlah 7	669.542	39									
5	WIL. VI BANDAR LAMPUNG	8	Lampung	95	Way Kanan	KPHP Unit III Bukit Punggur	SK.439/Menhut-II/2012	45.075		SK.7100/Menhut-II/Reg.I-1/2014	24 November 2014	KPHP Model	
96	Provinsi	KPHP Unit XVI Gedong Wani	SK.427/Menhut-II/2011 tgl 27 Juli 2011	30.243				SK.293/Menhut-II/Reg.I-1/2014	11 Februari 2014	KPHP Model			
97	Provinsi	KPHP Unit IV Muara Dua	SK.236/Menhut-II/2012 tgl 10 Mei 2012	49.134				SK.294/Menhut-II/Reg.I-1/2014	11 Februari 2014	KPHP Model			
98	Lampung Tengah	KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan	SK.794/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	12.500				SK.3039/Menhut-II/Reg.I-1/2014	22 April 2014	KPHP Model			
99	Mesuji	KPHP Unit V Sungai Buaya	SK.996/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	44.249				SK.4885/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018	23 Juli 2018	KPHP Model			
100		KPHP Unit I	SK.473/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	39.001				Belum menyusun RPHJP					

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN		
			101	KPHP Unit XIV	SK.473/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	9.866			Belum menyusun RPHJP				
		9 Bengkulu			Jumlah 8	230.068							
			102	Muko Muko	KPHP Unit I Muko Muko	SK.330/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010			SK.3038/Menhut-II/Reg.I-1/2014	22 April 2014	KPHP Model		
			103	Bengkulu Utara	KPHP Unit III Bengkulu Utara	SK.995/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013			SK.1229/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	23 Maret 2018	KPHP Model		
					Jumlah 9	130.625							
6	WIL. VII DENPASAR	10 D.I. Yogyakarta	104	Provinsi	KPHP Yogyakarta	SK.721/Menhut-II/2011 tgl 20 Desember 2011			Tahun 2015 (Predikat Penilaian : Baik)	248	SK.4051/Menhut-II/Reg.2-1/2014	28 Mei 2014	KPHP Model
					Jumlah 10	15.725				248			
		11 Nusa Tenggara Barat	105		KPHP Unit XX Madapangga Rempu	SK.631/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.276/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017			
			106	Sumbawa	KPHP Unit IX Batulanteh	SK.342/Menhut-II/2011 tgl 28 Juni 2011			Tahun 2016 (Predikat Penilaian : Sedang)	1.015	SK.4052/Menhut-II/Reg.2-1/2014	28 Mei 2014	KPHP Model
			107	Provinsi	KPHP Unit XXIII Maria	SK.752/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012			SK.634/Menhut-II/Reg.2-1/2015	12 Maret 2015	KPHP Model		
			108	Provinsi	KPHP Unit XVIII Tambora Utara	SK.970/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013			SK.740/Menhut-II/Reg.2-1/2015	31 Maret 2015	KPHP Model		
			109	Sumbawa Barat	KPHP Unit V Sejorong	SK.963/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013			SK.6102/Menhut-II/Reg.2-1/2014	15 Oktober 2014	KPHP Model		
			110	Sumbawa Barat, Sumbawa	KPHP Unit X Orong Telu	SK.841/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.10479/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019			
			111	Sumbawa	KPHP Unit XI Brang Beh	SK.841/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.10480/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019			
			112	Sumbawa	KPHP Unit XIII Plampang	SK.841/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.6325/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2019	18 Juli 2019			
			113	Dompu, Sumbawa	KPHP Unit XV Ampang Riwo	SK.841/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016					Proses perbaikan RPHJP		
			114	Lombok Barat	KPHP Unit II Pelangan	SK.471/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017					Proses perbaikan RPHJP		
			115		KPHP Unit XVII	SK.471/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017					Belum menyusun RPHJP		
			116	Bima	KPHP Unit XXI Waworada	SK.471/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017					Proses perbaikan RPHJP		
					Jumlah 11	440.746				1.015			
		12 Nusa Tenggara Timur	117	Nagekeo	KPHP Unit V Nagekeo	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015					Sudah menyusun RPHJP		
			118	Ende	KPHP Unit VI Ende	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.10478/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019			
			119	Timor Tengah Selatan	KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015					Proses perbaikan RPHJP		

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
				120	Timor Tengah Utara KPHP Unit XXI Timor Tengah Utara	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			Sudah menyusun RPHJP		
				121	Rote Ndao KPHP Unit XVI Rote Ndao	SK.333/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010		25	SK.700/Menhut-II/Reg.2-1/2015	20 Maret 2015	KPHP Model
				122	Manggarai Barat KPHP Unit I Manggarai Barat	SK.973/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013			SK.426/Menhut-II/Reg.2-1/2015	23 Februari 2015	KPHP Model
				123	Timor Tengah Selatan, Kupang KPHP Unit XVII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Belum menyusun RPHJP		
				124	KPHP Unit XII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
				125	KPHP Unit XIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
						Jumlah 12	487.593	25			
7	WIL. VIII PONTIANAK	13	Kalimantan Barat	126	Putusibau KPHP Unit XVIII Kapuas Hulu	SK.380/Menhut-II/2010 tgl 18 Juli 2010			SK.16/Menhut-II/Reg.III/2014	21 Oktober 2014	KPHP Model
				127	Sintang KPHP Unit X Sintang Utara	SK.791/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009			SK.10477/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019	KPHP Model
				128	Kendawangan KPHP Unit XXXII Kendawangan	SK.680/Menhut-II/2012 tgl 23 November 2012			Sudah menyusun RPHJP		KPHP Model
				129	Melawi KPHP Unit XXIII Menukung	SK.620/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			Belum menyusun RPHJP		
				130	Melawi KPHP Unit XXIV Sokan	SK.620/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			Belum menyusun RPHJP		
				131	Ketapang KPHP Unit XXV Belimbing	SK.620/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			Belum menyusun RPHJP		
				132	Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang KPHP Unit I	SK.834/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Belum menyusun RPHJP		
				133	Mempawah KPHP Unit VIII Mempawah	SK.834/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.6989/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019	22 Agustus 2019	
				134	Sintang, Melawi KPHP Unit XV Sintang Timur	SK.834/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.5930/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2019	25 Juni 2019	
				135	Ketapang KPHP Unit XXX	SK.834/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Belum menyusun RPHJP		
				136	Lamandau, Ketapang, Sukamara KPHP Unit XXXI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			Belum menyusun RPHJP		
				137	Kubu Raya KPHP Unit XXXIII Kubu Raya	SK.834/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016			SK.6677/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019	8 Agustus 2019	
						Jumlah 13	2.461.926				
8	WIL. IX BANJARBARU	14	Kalimantan Selatan	138	Tanah Bumbu KPHP Unit VI Tanah Bumbu	SK.624/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.52/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/1/2017	9 Januari 2017	
				139	Banjar KPHP Unit VII Banjar	SK.793/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2012		Tahun 2017 (Predikat Penilaian : Baik)	SK.15/Menhut-II/Reg.III/2014	21 Oktober 2014	KPHP Model

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN		
				140	Kotabaru	KPHP Unit III Pulau Laut dan Sebuku	SK.226/Menhut-II/2012 tgl 4 Mei 2012	112.258		SK.22/Menhut-II/Reg.III/2014	31 Desember 2014	KPHP Model	
				141	Tanah Laut	KPHP Unit VII Tanah Laut	SK.442/Menhut-II/2012 tgl 9 Agustus 2012	92.641	Tahun 2019 (Predikat Penilaian : Sedang)	SK.21/Menhut-II/Reg.III/2014	29 Desember 2014	KPHP Model	
				142	Tabalong	KPHP Unit V Tabalong	SK.997/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2012	117.357		SK.10/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	23 Desember 2016	KPHP Model	
				143		KPHP Unit II Cantung	SK.469/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	209.297		SK.52/Menlhk-KPHP/PKPHP/ HPL.0/1/2017	9 Januari 2017		
				144	Tabalong	KPHP Unit X Tabalong Kiwa	SK.469/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	117.914		Proses perbaikan RPHJP			
						Jumlah 14	1.052.343						
9	WIL. X PALANGKARAYA	15	Kalimantan Tengah	145	Kota Waringin Barat	KPHP Unit XXII dan XXVI Kota Waringin Barat	SK.749/Menhut-II/2012 tgl 26 Deseember 2012	316.135		30	SK.5/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016, Revisi No. SK.5048/MENLHK-	23 Desember 2016, 12 September 2018	KPHP Model
				146	Lamandau	KPHP Unit XXIII Lamandau	SK717/Menhut-II/2011 tgl 19 Dseember 2011	226.289		20	SK.8/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	23 Desember 2016	KPHP Model
				147	Seruyan	KPHP Unit XXI Seruyan	SK.716/Menhut-II/2012 tgl 19 Desember 2012	373.900		20	SK.6/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	23 Desember 2016	KPHP Model
				148	Murung Raya	KPHP Unit II Murung Raya	SK.964/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	908.255		20	SK.9/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	23 Desember 2016	KPHP Model
				149	Gunung Mas	KPHP Unit XVI Gunung Mas	SK.965/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	294.935		20	SK.7/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	23 Desember 2016	KPHP Model
				150	Kota Palangkaraya	KPHP Unit III Kahayan Tengah	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	59.185	Tahun 2019 (Predikat Penilaian : Sedang)		SK.5841/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2018	13 September 2018	
				151	Barito Utara	KPHP Unit V Barito Hulu	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	334.069			SK.2421/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	25 April 2018	
				152	Barito Timur	KPHP Unit XIV Barito Hilir	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	48.400			Proses perbaikan RPHJP		
				153	Kotawaringin Timur	KPHP Unit XXIX Kotawaringin Timur	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	200.518			Sudah menyusun RPHJP		
				154	Pulang Pisau	KPHP Unit XXXI Kahayan Hilir	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	378.819			SK.8655/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	17 Desember 2018	
				155	Barito Utara, Barito Selatan	KPHP Unit VII Barito Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	158.785			SK.5294/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/5/2019	31 Mei 2019	
				156	Barito Utara, Murung Raya, Kapuas, Barito Selatan	KPHP Unit X	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	244.231			Belum menyusun RPHJP		
				157	Kapuas	KPHP Unit XI Kapuas Tengah	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	274.875			SK.8656/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	17 Desember 2018	
				158	Katingan	KPHP Unit XVII Katingan Hulu	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	681.864			SK.1883/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	17 April 2018	

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
			159	Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, Gunung Mas	KPHP Unit XVIII Kahayan Tengah	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	140.418		SK.1383/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2019	19 Februari 2019	
			160	Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan	KPHP Unit XIX Mentaya Hulu-Seruyan Tengah	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	366.726		SK.8215/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/11/2018	29 November 2018	
			161	Lamandau, Ketapang, Kotawaringin Barat, Sukamara	KPHP Unit XXIV	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	92.242		Belum menyusun RPHJP		
			162	Sukamara	KPHP Unit XXV Sukamara	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	157.199		SK.8735/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	21 Desember 2018	
			163	Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan	KPHP Unit XXVII Mentaya Tengah Seruyan Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	302.601		SK.9005/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/10/2019	23 Oktober 2019	
			164	Kotawaringin Timur	KPHP Unit XXVIII Mentaya Tengah Seruyan Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	144.535		SK.1449/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	3 April 2018	
			165	Katingan, Kotawaringin Timur	KPHP Unit XXX Katingan Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	217.832		SK.1033/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/1/2019	30 Januari 2019	
			166	Murung Raya	KPHP Unit I Murung Raya	SK.474/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	1.063.147		SK.5915/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/6/2019	21 Juni 2019	
			167		KPHP Unit VI	SK.474/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	180.311		Belum menyusun RPHJP		
			168		KPHP Unit VIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	107.713		Belum menyusun RPHJP		
			169		KPHP Unit XII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	184.028		Belum menyusun RPHJP		
			170		KPHP Unit XIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	182.947		Belum menyusun RPHJP		
			171		KPHP Unit XV	SK.474/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	203.828		Belum menyusun RPHJP		
			172		KPHP Unit XX	SK.474/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	189.920		Belum menyusun RPHJP		
					Jumlah 15	8.033.707		110			
10	WIL. XI SAMARINDA	16	Kalimantan Timur	173 Berau	KPHP Unit XII Berau Barat	SK.649/Menhut-II/2010 tgl 22 November 2010	775.539	Tahun 2015 (Predikat Penilaian : Sedang)	SK.19/Menhut-II/Reg.III/2014	21 Oktober 2014	KPHP Model
				174 Provinsi	KPHP Unit XXXI Meratus	SK.964/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	387.488		SK.20/Menhut-II/Reg.III/2014	29 Desember 2014	KPHP Model
				175 Paser	KPHP Unit XXXIV Kendilo	SK.964/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	139.235		230 SK.279/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	KPHP Model
				176 Kutai Kartanegara	KPHP Unit XXVI DAS Belayan	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	979.933		SK.290/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	2 Februari 2018	
				177 Kutai Barat	KPHP Unit XXVII Santan	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	263.467		10 SK.284/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	
				178 Kutai Kartanegara	KPHP Unit XXIX Delta Mahakam	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	109.314		7 SK.281/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
			179	Provinsi	KPHP Unit XXXII Bongan	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015		5	SK.283/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	
			180	Paser	KPHP Unit XXXIII Telakai	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.282/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	1 Februari 2017	
			181		KPHP Unit XIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Belum menyusun RPHJP	
			182		KPHP Unit XV Berau Tengah	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Proses perbaikan RPHJP	
			183		KPHP Unit XVI	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Belum menyusun RPHJP	
			184	Kutai Timur	KPHP Unit XVII Manubar	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Proses perbaikan RPHJP	
			185	Kutai Timur	KPHP Unit XVIII Bengalon	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Proses perbaikan RPHJP	
			186		KPHP Unit XIX Kelinjau	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Proses perbaikan RPHJP	
			187		KPHP Unit XXIII Batu Ayau	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Proses perbaikan RPHJP	
			188		KPHP Unit XXIV Damai	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Proses perbaikan RPHJP	
			189		KPHP Unit XXV Mook Manoor Bulatn	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Proses perbaikan RPHJP	
			190		KPHP Unit XXVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Belum menyusun RPHJP	
					Jumlah 16	7.209.590		262			
17		Kalimantan Utara	191	Bulungan	KPHP Unit V Kayan	SK.223/Menhut-II/2012 tgl 4 Mei 2012			SK.7232/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2018	12 Oktober 2018	KPHP Model 8
			192	Malinau provinsi	KPHP Unit X Malinau	SK.224/Menhut-II/2012 tgl 4 Mei 2012		5	SK.2374/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/4/2017	25 April 2017	KPHP Model
			193	Tana Tidung	KPHP Unit VII Tana Tidung	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015				Proses perbaikan RPHJP	
			194		KPHP Unit II	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Belum menyusun RPHJP	
			195		KPHP Unit III Lumbis	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			SK.8434/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	7 Desember 2018	
			196		KPHP Unit IV Nunukan	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			SK.1380/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2019	19 Februari 2019	
			197		KPHP Unit V	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Belum menyusun RPHJP	
			198		KPHP Unit VIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017				Belum menyusun RPHJP	

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
				199	KPHP Unit XI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Belum menyusun RPHJP		
				200	Bulungan KPHP Unit XIII Keburau	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			SK.8880/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2019	18 Oktober 2019	
				201	KPHP Unit XX	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Belum menyusun RPHJP		
				202	KPHP Unit XXI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Belum menyusun RPHJP		
				Jumlah 17		4.327.555		5			
11	WIL. XII PALU	18	Gorontalo	203	Boalemo KPHP Unit V Boalemo	SK.402/Menhut-II/2011 tgl 21 Juli 2011	Tahun 2017 (Predikat Penilaian : Baik)	20	SK.108/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Januari 2014	KPHP Model
				204	Gorontalo KPHP Unit VI Gorontalo	SK.976/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013		12	SK.7315/Menhut-II/Reg.4-1/2014	5 Desember 2014	KPHP Model
				205	Gorontalo Utara KPHP Unit IV Gorontalo Utara	SK.766/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012			SK.6521/Menhut-II/Reg.4-1/2014	24 Oktober 2014	KPHP Model
				206	Bone Bolango KPHP Unit VII Bone Bolango	SK.639/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.6102/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2016	4 November 2016	
				207	KPHP Unit I	SK.476/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017			Proses perbaikan RPHJP		
				Jumlah 18		306.711		32			
		19	Sulawesi Utara	208	Provinsi KPHP Unit IV Poigar	SK.788/Menhut-II/2009	Tahun 2018 (Predikat Penilaian : Sedang)	75	SK.265/Menhut-II/Reg.4-2/2014	7 Februari 2014	KPHP Model
				209	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara KPHP Unit I	SK.729/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			Proses perbaikan RPHJP		
				210	Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Timur KPHP Unit II	SK.729/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017			SK.1920/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2019	19 Maret 2019	
				Jumlah 19		323.923		75			
		20	Sulawesi Tengah	211	Provinsi KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	SK.792/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009		56	SK.694/Menhut-II/Reg.4-2/2013	27 Desember 2013	KPHP Model
				212	Provinsi KPHP Unit VI dan IX Dolago Tanggunung	SK.755/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012		15	SK.3935/Menhut-II/Reg.4-1/2014	16 Mei 2014	KPHP Model
				213	Buol KPHP Unit I Pogogul	SK.756/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012		60	SK.5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014	8 September 2014	KPHP Model
				214	Banggai KPHP Unit XX Balantak	SK.754/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012			SK.5579/Menhut-II/Reg.4-1/2014	8 September 2014	KPHP Model
				215	Provinsi KPHP Unit XIX Toili Baturube	SK.967/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013		10	SK.6522/Menhut-II/Reg.4-1/2014	24 Oktober 2014	KPHP Model
				216	Tojo Una-Una KPHP Unit XVII Sivia Patuju	SK.968/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	Tahun 2018 (Predikat Penilaian : Sedang)		SK.7316/Menhut-II/Reg.4-1/2014	5 Desember 2014	KPHP Model
				217	Poso KPHP Unit XI Sintuwu Maroso	SK.639/Menhut-II/2011 tgl 7 November 2011		25	SK.3934/Menhut-II/Reg.4-1/2014	16 Mei 2014	KPHP Model
				218	Donggala KPHP Unit II Gunung Dako	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.6880/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017	21 Desember 2017	
				219	Donggala KPHP Unit VII Banawa Lalundu	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Tahun 2019 (Predikat Penilaian : Baik)		SK.741/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	28 Februari 2017	
				220	Morowali KPHP Unit XIV Tepe Asa Maroso	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015			SK.2420/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	25 April 2018	

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN	
				221	Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	KPHP Unit XXI Pulau Peling	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	117.079		SK.7152/Menlhk-KPHP/PKPHP/ HPL.0/8/2019	30 Agustus 2019	
				222	Donggala, Parigi Moutong, Kota Palu	KPHP Unit V	SK.849/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	111.273		SK.740/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	28 Februari 2017	
				223	Tojo Una-Una, Morowali Utara, Poso	KPHP Unit XVI Sivia Patuju	SK.476/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	211.056		SK.10372/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	26 Desember 2019	
				224		KPHP Unit XII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	92.179		Belum menyusun RPHJP		
				225		KPHP Unit XV Tepo Asa Aroa	SK.735/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	156.582		Proses perbaikan RPHJP		
				226		KPHP Unit XVIII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	179.581		Belum menyusun RPHJP		
						Jumlah 20	2.420.074		166			
12	WIL. XIII MAKASSAR	21	Sulawesi Tenggara	227	Buton	KPHP Unit III Lakompa	SK.795/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	30.600		SK. 764/Menhut-II/Reg.4-1/2015	31 Maret 2015	KPHP Model
				228	Provinsi	KPHP Unit XXIV Gula Raya	SK.61/Menhut-II/2011 tgl 28 Pebruari 2011	134.419	Tahun 2016 (Predikat Penilaian : Baik)	SK.3694/Menhut-II/Reg.4-1/2014, Revisi SK.6774/MENLHK-KPHP/HPL.0/12/2017	9 Mei 2014, 14 Desember 2017	KPHP Model
				229	Bombana	KPHP Unit X Tina Orima	SK.426/Menhut-II/2011 tgl 27 Juli 2011	116.126		SK.2684/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/6/2016, Revisi SK.6780/MENLHK-	9 Juni 2016, 14 Desember 2017	KPHP Model
				230	Kota Bau Bau	KPHP Unit V Kota Bau-Bau	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	12.179		Belum menyusun RPHJP		
				231	Muna	KPHP Unit VI Muna	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	73.726		SK.760/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	14 Februari 2018	
				232	Kolaka/Koltim	KPHP Unit XI Mekongga Selatan	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	46.580		SK.435/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	8 Februari 2017	
				233	Kolaka/Koltim	KPHP Unit XII Ladongi	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	47.088		SK.436/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2017	8 Februari 2017	
				234	Konawe Utara	KPHP Unit XIX Bina Mawahana Sejuk	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	113.580		SK.2376/MenLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/4/2017	25 April 2017	
				235	Muna, Buton Utara	KPHP Unit VIII Gantara	SK.854/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	18.588		SK.9262/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/10/2019	31 Oktober 2019	
				236		KPHP Unit I Kapontori	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA .O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	13.793		Proses perbaikan RPHJP		
				237		KPHP Unit II	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA .O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	48.282		Belum menyusun RPHJP		
				238		KPHP Unit IX Pulau Kabaena	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA .O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	46.315		Proses perbaikan RPHJP		
				239		KPHP Unit XV	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA .O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	93.115		Belum menyusun RPHJP		

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN			
13	WIL. XIV AMBON	22	Sulawesi Selatan	240	KPHP Unit XVII Patampanua Utara	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	105.549			Proses perbaikan RPHJP				
				241	KPHP Unit XXIII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	36.562			Belum menyusun RPHJP				
						Jumlah 21	936.502		50					
			242	Provinsi	KPHP Unit IX Jeneberang	SK.715/Menhut-II/2011	160.854			SK.266/Menhut-II/Reg.4-2/2014	7 Februari 2014	KPHP Model		
			243	Wajo	KPHP Unit V dan VI Awota	SK.979/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	19.071			SK.806/Menhut-II/Reg.4-2/2015	1 April 2015	KPHP Model		
			244	Selayar	KPHP Unit X Kepulauan Selayar	SK.616/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	20.901			SK.4/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	23 Desember 2016			
					Jumlah 22	200.826								
			23	Sulawesi Barat	245	Mamasa	KPHP Unit VII Mamasa Barat	SK.341/Menhut-II/2011	53.555		15	SK.5581/Menhut-II/Reg.4-1/2014	8 September 2014	KPHP Model
			246	Provinsi	KPHP Unit V Budong Budong	SK.998/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	128.096	Tahun 2018 (Predikat Penilaian : Sedang)		SK.817/Menhut-II/Reg.4-1/2015	1 April 2015	KPHP Model		
			247	Karosa	KPHP Unit IV Karossa	SK.636/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	63.110			SK.305/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/2/2018	5 Februari 2018			
			248	Karama	KPHP Unit VI Karama	SK.636/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	156.917			SK.3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	23 Desember 2016			
				Jumlah 23	401.678			15						
		24	Maluku	249	Buru	KPHP unit II Wae Apu	SK.770/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	232.432			SK.8273/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/12/2018	21 Desember 2018	KPHP Model	
		250	Maluku Tengah	KPHP Unit VII Wae Sapalewa	SK.336/Menhut-II/2010 tgl 25 mei 2010	67.057			SK.6881/Menlhk-KPHP/PKPHP/ HPL.0/12/2017	21 Desember 2017	KPHP Model			
		251	Maluku Tengah	KPHP Unit III Wae Tina	SK.977/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	204.384			SK.1077/Menlhk-KPHP/PKPHP/ HPL.0/1/2019	31 Januari 2019	KPHP Model			
		252	Seram Bagian Timur	KPHP Unit X Wae Bubi	SK.978/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	66.464			6	SK.3193/Menlhk-KPHP/PKPHP/ HPL.0/4/2019	4 April 2019	KPHP Model		
		253		KPHP Unit I Wae Mala-Wae Mikona	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	144.539				Proses perbaikan RPHJP				
		254	Maluku Tenggara Barat	KPHP Unit XVIII Bungal	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	132.339				SK.6564/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/7/2019	30 Juli 2019			
		255		KPHP Unit XXI P. Molkar - P. Trangan	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	70.159				Proses perbaikan RPHJP				
		256		KPHP Unit XXII (Revisi KPHL)	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	132.116				Belum menyusun RPHJP				
		257	Seram Bagian Timur	KPHP Unit XII Wae Masiwang	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.O/11/2016 tgl 9 Nov 2016	193.041				Proses perbaikan RPHJP				
		258		KPHP Unit IV	SK.85/MENLHK/SETJEN/KU M.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	140.952				Belum menyusun RPHJP				
		259		KPHP Unit VI Wae Mala	SK.85/MENLHK/SETJEN/KU M.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	127.944				Proses perbaikan RPHJP				

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN		
				260	KPHP Unit VIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/KU M.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP				
				261	KPHP Unit XI	SK.85/MENLHK/SETJEN/KU M.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP				
				262	KPHP Unit XVII	SK.85/MENLHK/SETJEN/KU M.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP				
				263	KPHP Unit XIX Babar Moa	SK.85/MENLHK/SETJEN/KU M.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Proses perbaikan RPHJP				
				264	KPHP Unit XX	SK.85/MENLHK/SETJEN/KU M.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP				
				Jumlah 24		1.923.696		6					
		25 Maluku Utara		265	Provinsi	KPHP Unit X Gunung Sinopa	SK.337/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010		Tahun 2016 (Predikat Penilaian : Sedang)		SK.7578/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014	KPHP Model
				266	Halmahera Selatan	KPHP Unit XIII Bacan	SK.969/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013		29		SK.7580/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014	KPHP Model
				267	Halmahera Timur	KPHP Unit IV Halmahera Timur	SK.619/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015						
				268	Kota Tidore Kepulauan	KPHP Unit IX Oba	SK.619/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015				SK.5485/MENLHK-KPHP/HPL.0/ 10/2017	18 Oktober 2017	
				269	Kepulauan Sula	KPHP Unit XVI Kepulauan Sula	SK.619/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015						
				270	Halmahera Selatan, Kota Tidore	KPHP Unit XII	SK.838/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016				SK.5486/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2017	18 Oktober 2017	
				271		KPHP Unit V	SK.470/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017						
				272		KPHP Unit VIII Talawi	SK.470/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017						
				273		KPHP Unit VII Damuli	SK.470/MENLHK/SETJEN/PL A.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017						
				274		KPHP Unit XIV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017						
				275		KPHP Unit XV Wai Todontaha	SK.728/MENLHK/SETJEN/PL A.0/12/2017 tgl 29 Des 2017						
				Jumlah 25		1.238.353		29					
14	WIL. XV JAYAPURA	26	Papua	276	Keerom	KPHP Unit XXIX Keerom	SK.828/Menhut-II/2013 tgl 19 November 2013				SK.6520/Menhut-II/Reg.4-1/2014	24 Oktober 2014	KPHP Model
				277	Waropen	KPHP Unit XVII Waropen	SK.760/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012				SK.5881/Menhut-II/Reg.4-1/2014	23 September 2014	KPHP Model
				278	Provinsi	KPHP Unit XXII Sarmi	SK.829/Menhut-II/2013 tgl 19 November 2013				SK.5880/Menhut-II/Reg.4-1/2014	23 September 2014	KPHP Model
				279	Kepulauan Yapen	KPHP Unit XIX Yapen	SK.786/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009				SK.4631/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/9/2017	5 September 2017	KPHP Model
				280	Sarmi	KPHP Unit XXII Sarmi	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015						

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN	
			281	Kota Jayapura	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	47.726			SK.5293/MENLHK-KPHP/HPL.0/5/2019	31 Mei 2019	
			282	Nduga	KPHP Unit XLIII Nduga	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	257.531			SK.6314/MENLHK-KPHP/HPL.0/9/2018	28 September 2018	
			283	Boven Digul	KPHP Unit LI Boven Digul	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	666.097			Belum menyusun RPHJP		
			284	Nabire, Dogiyai	KPHP Unit III	SK.843/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	194.846			Belum menyusun RPHJP		
			285	Jayapura, Sarmi	KPHP Unit XXIII Sarmi	SK.843/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	122.820			Proses perbaikan RPHJP		
			286	Keerom, Jayapura, Sarmi	KPHP Unit XXV	SK.843/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	354.901			Belum menyusun RPHJP		
			287	Asmat, Mappi	KPHP Unit XLVII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	461.382			Belum menyusun RPHJP		
			288	Bovendigoel, Mappi, Asmat	KPHP Unit XLVIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	573.543			Belum menyusun RPHJP		
			289	Asmat, Mappi, Merauke	KPHP Unit XLIX	SK.843/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	539.996			Belum menyusun RPHJP		
			290	Bovendigoel, Mappi, Merauke	KPHP Unit LIII Bovendigoel	SK.843/MENLHK/SETJEN/PL A.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	649.375			Proses perbaikan RPHJP		
			291		KPHP Unit IV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	317.625			Belum menyusun RPHJP		
			292		KPHP Unit IX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	266.595			Belum menyusun RPHJP		
			293		KPHP Unit L	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	309.709			Belum menyusun RPHJP		
			294		KPHP Unit LII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	500.489			Belum menyusun RPHJP		
			295		KPHP Unit LIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	249.580			Belum menyusun RPHJP		
			296		KPHP Unit LV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	937.154			Belum menyusun RPHJP		
			297		KPHP Unit XIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	631.259			Belum menyusun RPHJP		
			298		KPHP Unit XIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	199.047			Belum menyusun RPHJP		
			299		KPHP Unit XLVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	449.718			Belum menyusun RPHJP		
			300		KPHP Unit XV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA .0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	473.908			Belum menyusun RPHJP		

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
				301	KPHP Unit XVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
				302	KPHP Unit XXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
				303	KPHP Unit XXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
				304	KPHP Unit XXX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
				305	KPHP Unit XXXII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
				306	KPHP Unit XXXIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019			Belum menyusun RPHJP		
					Jumlah 26	10.682.408					
15	WIL. XVI MANOKWARI	27	Papua Barat	307	Sorong	KPHP Unit II Sorong	SK.701/Menhut-II/2010 tgl 20 Desember 2010		SK.7582/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014	KPHP Model
				308	Sorong Selatan	KPHP Unit V Sorong Selatan	SK.771/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012		SK.7318/Menhut-II/Reg.4-1/2014	5 Desember 2014	KPHP Model
				309	Tambraw	KPHP Unit IV Tambraw	SK. 630/MenLHK-Setjen/2015 Tgl 14 Des 2015				Proses perbaikan RPHJP
				310	Bintuni	KPHP Unit XV Bintuni	SK. 630/MenLHK-Setjen/2015 Tgl 14 Des 2015				Proses perbaikan RPHJP
				311	Fakfak	KPHP Unit XVI Fakfak	SK. 630/MenLHK-Setjen/2015 Tgl 14 Des 2015				Proses perbaikan RPHJP
				312		KPHP Unit VII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP
				313		KPHP Unit VIII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP
				314		KPHP Unit IX	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP
				315		KPHP Unit X	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP
				316		KPHP Unit XI	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP
				317		KPHP Unit XIV	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP
				318		KPHP Unit XVII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP
				319		KPHP Unit XVIII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019				Belum menyusun RPHJP

No.	BPHP	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	PENILAIAN KINERJA PHPL	Jumlah Penanaman (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	KETERANGAN
			320	KPHP Unit XIX	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	235.427			Belum menyusun RPHJP		
			321	KPHP Unit XX	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	399.415			Belum menyusun RPHJP		
			322	KPHP Unit XI	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	390.140			Belum menyusun RPHJP		
					Jumlah 27	3.831.760	20	2.424			
			JUMLAH TOTAL (1 s/d 27) sudah termasuk Prov. Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara			56.117.377					

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PER PROVINSI TAHUN 2019

Legenda

- Perkembangan Luas IUPHHK-HA (ha) ▲ Perkembangan Penanaman IUPHHK-HA (ha)
- Perkembangan Luas IUPHHK-HT (ha) ▲ Perkembangan Penanaman IUPHHK-HT
- ★ Perkembangan Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA (m3) ▲ Perkembangan Penanaman IUPHHK-HT
- ★ Perkembangan Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HT (m3) ▲ Perkembangan Penanaman IUPHHK-HT
- ♠♠ Perkembangan Tenaga Kerja IUPHHK-HA (orang)
- ♠♠ Perkembangan Tenaga Kerja IUPHHK-HT (orang)

Nangroe Aceh Darussalam ■ 125.204 ▲ - ■ 224.109 ▲ - ★ - ♠♠ - ★ 387,56 ♠♠ -	Bengkulu ■ 64.988 ▲ - ■ - ▲ - ★ 3.835 ♠♠ 42 ★ - ♠♠ -	Jawa Barat ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Nusa Tenggara Timur ■ - ▲ - ■ 54.175 ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Sulawesi Utara ■ 26.800 ▲ - ■ 7.500 ▲ - ★ 274,37 ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Maluku ■ 720.634 ▲ - ■ 33.245 ▲ - ★ 256.190,75 ♠♠ 891 ★ - ♠♠ -
Sumatera Utara ■ 302.993 ▲ 10,00 ■ 523.307 ▲ 7.571,90 ★ 29.420,57 ♠♠ 430 ★ 1.191.713,51 ♠♠ 2.939	Lampung ■ - ▲ - ■ 108.909 ▲ 995,56 ★ - ♠♠ - ★ 87.837,85 ♠♠ 68	DI Yogyakarta ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Kalimantan Timur ■ 3.220.385,83 ▲ 1.143,97 ■ 1.865.124,62 ▲ 31.533,26 ★ 1.022.858,31 ♠♠ 3.242 ★ 3.435.601,93 ♠♠ 1.887	Gorontalo ■ - ▲ - ■ 74.146,78 ▲ 1.228,26 ★ - ♠♠ - ★ 50,65 ♠♠ -	Maluku Utara ■ 782.006 ▲ 309,00 ■ 65.908 ▲ - ★ 102.105,75 ♠♠ 602 ★ 1.100,13 ♠♠ 96
Sumatera Barat ■ 183.705 ▲ 208,00 ■ 65.433 ▲ 230,00 ★ 104.442,00 ♠♠ 432 ★ 29.955,55 ♠♠ -	Kep. Riau ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Jawa Tengah ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Kalimantan Barat ■ 1.090.450 ▲ 4,90 ■ 1.903.429 ▲ 13.243,67 ★ 156.311,21 ♠♠ 1.708 ★ 906.894,29 ♠♠ 805	Sulawesi Tengah ■ 336.425 ▲ - ■ 73.320 ▲ - ★ 8.410,73 ♠♠ 74 ★ - ♠♠ -	Papua ■ 2.567.205,79 ▲ 100,00 ■ 898.645 ▲ 948,07 ★ 439.227,50 ♠♠ 768 ★ - ♠♠ -
Riau ■ 135.476 ▲ 1.482,39 ■ 1.401.598 ▲ 123.317,62 ★ 535.746 ♠♠ 458 ★ 19.451.141,96 ♠♠ 3.814	Kep. Bangka Belitung ■ - ▲ - ■ 266.437 ▲ 2.077,12 ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ 74	Jawa Timur ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Kalimantan Selatan ■ 192.746 ▲ - ■ 552.793 ▲ 6.373,02 ★ 17.622,01 ♠♠ 97 ★ 11.351,39 ♠♠ 279	Sulawesi Selatan ■ - ▲ - ■ 21.430 ▲ - ★ - ♠♠ - ★ 6.914,41 ♠♠ -	Papua Barat ■ 2.915.065 ▲ - ■ 87.225 ▲ - ★ 777.309,37 ♠♠ 173 ★ - ♠♠ -
Jambi ■ 56.045 ▲ - ■ 686.662 ▲ 42.207,43 ★ 73 ♠♠ - ★ 4.960.977,77 ♠♠ 1.647	Banten ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Bali ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Kalimantan Tengah ■ 3.922.394,76 ▲ 16.471,79 ■ 851.802 ▲ 6.189,48 ★ 1.969.773,40 ♠♠ 8.619 ★ 1.192.082,77 ♠♠ 193	Sulawesi Barat ■ 30.525 ▲ - ■ 47.610 ▲ - ★ 4.087,75 ♠♠ 35 ★ - ♠♠ -	
Sumatera Selatan ■ - ▲ - ■ 1.315.586 ▲ 87.088,72 ★ - ♠♠ - ★ 7.635.824,69 ♠♠ 5.316	DKI Jakarta ■ - ▲ - ■ - ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	Nusa Tenggara Barat ■ 28.644 ▲ - ■ 75.810 ▲ 246,10 ★ 28.734 ♠♠ - ★ 4.843,57 ♠♠ -	Kalimantan Utara ■ 2.162.188,04 ▲ 864,00 ■ KalTim ▲ 6.822,60 ★ 726.675,41 ♠♠ 1.965 ★ 528.713,22 ♠♠ -	Sulawesi Tenggara ■ - ▲ - ■ 54.280 ▲ - ★ - ♠♠ - ★ - ♠♠ -	

PRODUKSI KAYU BULAT

	IUPHHK-HA	IUPHHK-HT
2015	5.624.053,40	33.229.564,25
2016	5.429.543,95	32.191.691,96
2017	5.407.235,58	37.798.711,04
2018	7.020.985,76	40.945.378,90
2019	6.183.097,54	40.021.200,82

Sumber:
Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.1
PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		UM	Luas (HA)										
1	Nangroe Aceh Darussalam	4	249.161,16	3	218.315,16	2	125.204,00	2	125.204,00	2	125.204,00	2	125.204,00
2	Sumatera Utara	7	343.603,00	7	343.603,00	7	343.603,00	6	302.993,00	6	302.993,00	6	302.993,00
3	Sumatera Barat	4	183.705,00	4	183.705,00	4	183.705,00	4	183.705,00	4	183.705,00	4	183.705,00
4	Riau	4	229.228,00	3	183.238,00	3	183.238,00	3	183.076,66	2	135.389,66	2	135.476,00
5	Jambi	2	56.045,00	2	56.045,00	2	56.045,00	2	56.045,00	2	56.045,00	2	56.045,00
6	Sumatera Selatan	1	56.000,00	1	56.000,00	1	56.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	2	56.070,00	2	56.070,00	2	56.070,00	2	64.988,00	2	64.988,00	2	64.988,00
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1	28.664,00	1	28.664,00	1	28.664,00	1	28.644,00	1	28.644,00	1	28.644,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	81	5.126.334,00	56	3.303.759,85	58	3.303.759,85	55	3.257.906,83	54	3.202.901,83	55	3.220.385,83
21	Kalimantan Barat	24	1.169.430,00	24	1.169.430,00	23	1.058.930,00	23	1.058.930,00	23	1.058.930,00	24	1.090.450,00
22	Kalimantan Selatan	4	231.066,00	4	231.066,00	4	231.066,00	4	209.001,00	4	209.001,00	4	192.746,00
23	Kalimantan Tengah	59	4.041.090,00	57	4.011.855,37	59	4.126.776,37	57	4.074.299,70	55	4.009.394,70	55	3.922.394,76
24	Kalimantan Utara	-	-	25	1.865.780,71	25	1.865.780,71	26	1.876.328,04	26	1.874.828,04	26	2.162.188,04
25	Sulawesi Utara	1	26.800,00	1	26.800,00	1	26.800,00	1	26.800,00	1	26.800,00	1	26.800,00
26	Gorontalo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11	610.125,00	8	409.255,00	8	409.255,00	8	391.405,00	7	336.425,00	7	336.425,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	3	163.205,00	3	163.205,00	2	114.565,00	1	30.525,00	1	30.525,00	2	30.525,00
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1	26.800,00	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	12	692.645,00	12	692.645,00	13	733.645,00	13	721.595,00	13	717.670,00	13	720.634,00
32	Maluku Utara	11	565.594,00	10	565.594,00	12	633.181,00	13	670.041,00	13	670.041,00	15	782.006,00
33	Papua	24	3.823.340,00	21	3.158.140,00	18	2.675.535,00	17	2.458.265,00	17	2.503.524,00	17	2.567.205,79
34	Papua Barat	18	2.476.948,00	19	2.476.948,00	22	3.062.978,00	21	3.089.605,00	21	2.978.978,00	20	2.915.065,00
JUMLAH		273	20.129.053,16	263	19.200.119,09	268	19.301.600,93	259	18.809.357,23	254	18.515.987,23	258	18.863.880,42

TABEL. 2.2
PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		UM	Luas (HA)										
1	Nangroe Aceh Darussalam	6	237.204,00	6	232.401,00	6	232.401,00	6	232.401,00	6	232.401,00	6	224.109,00
2	Sumatera Utara	8	368.650,00	8	368.650,00	8	368.650,00	8	365.610,00	8	365.610,00	8	523.306,52
3	Sumatera Barat	4	51.464,90	4	51.464,90	4	51.464,90	4	51.464,90	4	65.432,90	4	65.432,90
4	Riau	56	1.653.184,00	55	1.631.304,00	53	1.606.766,00	52	1.589.347,55	51	1.567.816,46	48	1.401.598,06
5	Jambi	18	694.657,00	18	694.657,00	20	707.862,00	19	699.862,00	18	686.662,42	18	686.662,42
6	Sumatera Selatan	19	1.303.010,00	19	1.303.010,00	19	1.333.925,00	19	1.330.405,08	19	1.324.653,02	19	1.315.586,02
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	4	115.834,00	4	115.834,00	4	115.834,00	4	115.834,00	3	108.909,00	3	108.909,00
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	7	214.912,00	8	244.322,00	8	244.322,00	9	275.952,00	9	266.457,00	9	266.437,19
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3	68.590,00	3	68.590,00	3	68.590,00	3	68.590,00	3	68.590,00	4	75.810,00
19	Nusa Tenggara Timur	2	54.175,00	2	54.175,00	2	54.175,00	2	54.175,00	2	54.175,00	2	54.175,00
20	Kalimantan Timur dan Utara	47	1.902.791,00	47	1.904.391,00	48	1.916.211,00	49	1.945.990,62	49	1.935.001,62	50	1.865.124,62
21	Kalimantan Barat	41	1.901.491,00	42	1.922.136,00	42	1.900.638,00	44	1.916.296,22	45	1.899.664,22	47	1.903.429,22
22	Kalimantan Selatan	17	552.255,00	17	552.255,00	17	552.521,87	17	552.521,87	17	603.832,00	17	552.793,00
23	Kalimantan Tengah	23	623.884,43	23	623.884,43	27	752.766,00	29	777.926,43	32	851.215,43	33	851.802,43
24	Sulawesi Utara	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00
25	Gorontalo	2	75.920,00	2	75.920,00	2	75.920,00	2	74.146,78	2	74.146,78	2	74.146,78
26	Sulawesi Tengah	2	73.320,00	2	73.320,00	2	73.320,00	2	73.320,00	2	73.320,00	2	73.320,00
27	Sulawesi Selatan	1	18.350,00	1	18.350,00	2	21.430,00	2	21.430,00	2	21.430,00	2	21.430,00
28	Sulawesi Barat	3	47.610,00	3	47.610,00	3	47.610,00	3	47.610,00	3	47.610,00	3	47.610,00
29	Sulawesi Tenggara	2	29.865,00	3	54.280,00	3	54.280,00	3	54.280,00	3	54.280,00	3	54.280,00
30	Maluku	2	66.205,00	2	66.205,00	2	66.205,00	2	66.205,00	2	66.205,00	1	33.245,00
31	Maluku Utara	5	65.908,00	5	65.908,00	5	65.908,00	5	65.908,00	5	65.908,00	5	65.908,00
32	Papua	2	233.450,00	5	524.675,00	4	424.695,00	7	691.845,00	8	898.645,00	8	898.645,00
33	Papua Barat	2	178.980,00	-	-	1	99.980,00	1	99.980,00	1	99.980,00	1	87.224,95
	JUMLAH	277	10.539.210,33	280	10.700.842,33	286	10.842.974,77	293	11.178.601,45	295	11.439.444,85	296	11.258.485,11

Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.3
PERKEMBANGAN INVESTASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	100.635.520,00	-	100.635.520,00	-	100.635.520,00	-	46.822.520,00	-	46.822.520,00	-	46.822.520,00
2	Sumatera Utara	-	339.257.851,00	-	339.257.851,00	-	339.257.851,00	-	317.318.851,00	-	317.318.851,00	-	317.318.851,00
3	Sumatera Barat	-	121.877.487,00	-	121.877.487,00	-	121.877.487,00	311.027.200.000,00	121.877.487,00	-	121.877.487,00	311.027.200.000,00	121.877.487,00
4	Riau	-	92.971.674,00	-	70.317.179,00	-	92.971.674,00	-	70.317.179,00	-	31.801.400,00	-	31.801.400,00
5	Jambi	-	51.402.690,00	-	51.402.690,00	-	51.402.690,00	-	58.476.690,00	-	58.476.690,00	-	58.476.690,00
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	43.926.900,00	-	43.926.900,00	-	43.926.900,00	-	43.926.900,00	-	43.926.900,00	-	43.926.900,00
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	9.682.042.393.500,00	3.640.794.680,00	9.682.042.393.500,00	2.540.762.152,00	9.682.042.393.500,00	2.540.762.152,00	9.682.042.393.500,00	2.263.062.848,00	9.682.042.393.500,00	2.191.402.196,00	9.682.042.393.500,00	2.146.821.196,00
21	Kalimantan Barat	-	736.012.834,00	-	720.305.834,00	-	720.305.834,00	-	1.350.805.508,00	-	684.731.912,00	-	684.731.912,00
22	Kalimantan Selatan	-	127.006.062,00	-	127.006.062,00	-	127.006.062,00	-	684.731.912,00	-	127.006.062,00	-	127.006.062,00
23	Kalimantan Tengah	323.797.922.302,00	2.324.448.379,00	323.797.922.302,00	2.278.849.899,00	323.797.922.302,00	2.278.849.899,00	653.610.334.302,00	127.006.062,00	653.610.334.302,00	2.169.294.604,43	653.610.334.302,00	2.169.294.604,43
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	2.215.965.899,43	-	1.350.805.508,00	-	1.350.805.508,00
25	Sulawesi Utara	-	9.005.500,00	-	-	-	9.005.500,00	-	9.005.500,00	-	9.005.500,00	-	9.005.500,00
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	239.778.714,00	-	-	-	228.587.183,00	-	186.781.984,00	-	168.920.584,00	-	168.920.584,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	116.389.000,00	-	-	-	116.389.000,00	-	35.640.000,00	-	35.640.000,00	-	35.640.000,00
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	210.380.710.800,00	150.709.455,00	210.380.710.800,00	-	210.380.710.800,00	142.185.500,00	210.380.710.800,00	142.185.500,00	210.380.710.800,00	142.185.500,00	210.380.710.800,00	142.185.500,00
32	Maluku Utara	-	442.097.181,00	-	-	-	442.097.181,00	-	442.097.181,00	-	442.097.181,00	-	442.097.181,00
33	Papua	-	1.090.373.929,00	-	1.048.860.268,00	-	1.048.860.268,00	42.720.727.854,00	845.709.307,00	42.720.727.854,00	746.547.307,00	42.720.727.854,00	746.547.307,00
34	Papua Barat	4.038.889.660.280,00	1.130.092.399,00	4.038.889.660.280,00	1.130.092.399,00	4.038.889.660.280,00	1.130.092.399,00	4.038.889.660.280,00	1.153.113.899,00	4.038.889.660.280,00	1.153.113.899,00	4.038.889.660.280,00	1.153.113.899,00
	JUMLAH	14.255.110.686.882,00	10.756.780.255,00	14.255.110.686.882,00	8.573.294.241,00	14.255.110.686.882,00	9.534.213.100,00	14.938.671.026.736,00	10.114.845.227,43	14.627.643.826.736,00	9.840.974.101,43	14.938.671.026.736,00	9.796.393.101,43

Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.4
PERKEMBANGAN INVESTASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
		1	Nangroe Aceh Darussalam	107.020.161.669,00	-	106.954.751.185,00	-	106.925.342.025,00	-	106.925.342.025,00	-	106.925.342.025,00	-
2	Sumatera Utara	1.879.900.736.513,00	-	1.883.394.144.618,00	-	1.883.394.144.618,00	-	1.883.394.144.618,00	-	1.883.394.144.618,00	-	1.883.394.144.618,00	-
3	Sumatera Barat	241.602.937.643,00	-	281.602.937.643,00	-	273.884.369.652,00	-	273.884.369.652,00	-	228.884.369.652,00	-	273.884.369.652,00	-
4	Riau	10.410.590.978.842,00	-	10.127.753.722.953,00	-	10.551.647.298.050,00	-	10.596.861.179.324,90	-	10.596.861.179.324,90	-	10.596.837.529.726,90	-
5	Jambi	4.398.012.262.138,00	-	4.398.012.262.138,00	-	4.898.399.349.142,00	-	4.898.399.349.142,00	-	4.898.399.349.142,00	-	1.337.560.230.510,00	-
6	Sumatera Selatan	6.016.985.454.351,00	-	6.016.985.454.351,00	-	6.407.623.164.623,89	-	6.407.623.164.623,89	-	6.407.623.164.623,89	-	9.782.991.723.692,89	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	475.512.786,00	-	492.329.749.076,00	-	267.089.210.270,00	-	267.089.210.270,00	-	267.089.210.270,00	-	285.799.306.551,00	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	2.093.255.197.000,00	-	2.093.255.197,00	-	1.921.675.376.494,00	-	1.921.675.376.494,00	-	1.921.675.376.494,00	-	1.665.345.773.776,00	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	47.639.091.000,00	-	47.639.091.000,00	-	47.639.091.000,00	-	47.639.091.000,00	-	47.639.091.000,00	-	1.845.352.394.000,00	-
19	Nusa Tenggara Timur	349.220.000.000,00	-	349.220.000.000,00	-	1.845.352.394.000,00	-	1.845.352.394.000,00	-	1.845.352.394.000,00	-	349.220.000.000,00	-
20	Kalimantan Timur	7.474.337.142.778,00	-	7.479.687.905.519,00	-	6.337.342.480.648,68	-	6.337.342.480.648,68	-	6.337.342.480.648,68	-	6.018.673.578.244,68	-
21	Kalimantan Barat	3.478.058.301.746,00	-	5.017.788.855.276,00	-	6.337.342.480.649,00	-	5.024.903.794.584,00	-	5.024.903.794.584,00	-	5.024.903.794.584,00	-
22	Kalimantan Selatan	1.019.182.542.036,00	-	1.019.182.542.036,00	-	951.631.363.504,00	-	951.631.363.504,00	-	951.631.363.504,00	-	1.003.117.397.529,00	-
23	Kalimantan Tengah	1.674.135.735.208,00	-	1.674.135.735.208,00	-	591.118.045.591,00	-	591.118.045.591,00	-	591.118.045.591,00	-	2.210.318.420.296,00	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	1.013.267.322.051,00	-	1.013.267.322.051,00	-	1.013.267.322.051,00	-	135.849.565.348,00	-
25	Sulawesi Utara	51.486.034.025,00	-	51.486.034.025,00	-	51.486.034.025,00	-	51.486.034.025,00	-	51.486.034.025,00	-	-	-
26	Gorontalo	435.647.206.000,00	-	435.647.206.000,00	-	435.647.206.000,00	-	435.647.206.000,00	-	435.647.206.000,00	-	47.639.091.000,00	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.338.909.000,00	-
28	Sulawesi Selatan	196.766.000.000,00	-	196.766.000.000,00	-	196.766.000.000,00	-	196.766.000.000,00	-	196.766.000.000,00	-	-	-
29	Sulawesi Barat	103.338.909.000,00	-	103.338.909.000,00	-	103.338.909.000,00	-	103.338.909.000,00	-	103.338.909.000,00	-	196.766.000.000,00	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.647.206.000,00	-
31	Maluku	349.220.000.000,00	-	349.220.000.000,00	-	349.220.000.000,00	-	349.220.000.000,00	-	349.220.000.000,00	-	34.875.211.617,00	-
32	Maluku Utara	302.110.893.112,00	-	302.110.893.112,00	-	302.110.893.112,00	-	302.110.893.112,00	-	302.110.893.112,00	-	267.235.681.495,00	-
33	Papua	755.097.000.000,00	-	755.097.000.000,00	-	755.097.000.000,00	-	755.097.000.000,00	-	755.097.000.000,00	-	755.097.000.000,00	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		41.384.082.095.847,00	0	41.090.446.448.337,00	0	45.627.997.474.455,60	0	44.360.772.669.665,50	0	44.315.772.669.665,50	0	44.360.772.669.665,50	0

Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.5
PERKEMBANGAN PENANAMAN PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
(IUPHHK-HA) PER PROVINSI
TAHUN 2014-2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	0,00	0,00
2	Sumatera Utara	660,00	-	134,00	87,50	83,79	10,00
3	Sumatera Barat	64,84	81,74	97,00	47,02	15,92	208,00
4	Riau	-	-	41,00	-	151,60	1.482,39
5	Jambi	-	-	-	-	0,00	0,00
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	0,00	0,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	0,00	0,00
8	Lampung	-	-	-	-	0,00	0,00
9	Kep.Riau	-	-	-	-	0,00	0,00
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	0,00	0,00
11	Banten	-	-	-	-	0,00	0,00
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	0,00	0,00
13	Jawa Barat	-	-	-	-	0,00	0,00
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	0,00	0,00
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	0,00	0,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	0,00	0,00
17	Bali	-	-	-	-	0,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	0,00	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	0,00	0,00
20	Kalimantan Timur	5.746,45	2.387,12	6.444,00	3.673,07	1.382,86	1.143,97
21	Kalimantan Barat	5.340,11	1.483,35	-	71,00	418,82	4,90
22	Kalimantan Selatan	-	1,00	225,00	-	0,00	0,00
23	Kalimantan Tengah	10.837,97	16.920,13	13.910,00	10.957,88	16.686,48	16.471,79
24	Kalimantan Utara	67,59	5,00	60,00	841,55	15,00	864,00
25	Sulawesi Utara	50,00	-	-	-	0,00	0,00
26	Gorontalo	-	-	-	-	0,00	0,00
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	0,00	0,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	0,00	0,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	0,00	0,00
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	0,00	0,00
31	Maluku	505,00	650,21	-	-	0,00	0,00
32	Maluku Utara	-	-	-	-	0,00	309,00
33	Papua	19,73	159.523,50	428,00	8,75	2.110,40	100,00
34	Papua Barat	1.052,18	-	-	255,00	0,00	0,00
JUMLAH		24.343,87	181.052,05	21.339,00	15.941,77	20.864,87	20.594,05

TABEL. 2.6
PERKEMBANGAN PENANAMAN PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(IUPHHK-HT) PER PROVINSI
TAHUN 2013-2019

No	Provinsi	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ha						
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	13.001,40	17.193,44	492,00	7.838,00	10.052,68	82,60	7.571,90
3	Sumatera Barat	317,00	1.500,00	250,70	-	61,09	18,00	230,00
4	Riau	142.703,28	299.567,00	126.719,00	104.028,00	76.594,21	50.546,89	123.317,62
5	Jambi	38.795,17	39.093,00	36.293,00	23.774,00	12.132,00	26.566,01	42.207,43
6	Sumatera Selatan	115.433,66	72.679,00	63.730,00	69.093,00	57.273,34	103.331,28	87.088,72
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	2.342,70	443,30	149,34	3.030,00	527,09	277,48	995,56
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	2.100,49	2.039,70	2.077,12
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	270,00	898,00	246,10
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	42.449,01	48.238,00	41.535,00	48.635,00	25.544,25	29.713,59	31.533,26
21	Kalimantan Barat	16.327,13	17.021,00	3.354,00	6.383,00	12.078,83	7.276,84	13.243,67
22	Kalimantan Selatan	6.985,80	423,68	1.432,00	767,00	2.922,80	2.579,06	6.373,02
23	Kalimantan Tengah	10.488,24	8.903,88	11.541,47	2.187,00	-	6.292,00	6.189,48
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	5.799,40	6.611,10	6.822,60
25	Sulawesi Utara	72,98	181,51	-	-	-	3.560,47	-
26	Gorontalo	1.421,12	1.276,47	5.375,00	3.253,00	1.401,00	-	1.228,26
27	Sulawesi Tengah	-	181,51	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	370,00	-	27,82	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	68,00	135,29	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	526,00	114,00	-	487,00	-	-	948,07
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	922,56	-
35	Perum Perhutani	39.683,00	55.949,00	42.426,00	30.230,00	-	-	-
JUMLAH		430.614,49	562.900,08	333.297,51	300.075,00	206.757,18	240.743,40	330.072,81

Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.7
PERKEMBANGAN PRODUKSI KAYU BULAT IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
(IUPHHK-HA) PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	57.037,69	66.876,88	62.489,86	35.560,86	49.121,40	29.420,57
3	Sumatera Barat	123.689,73	122.588,39	89.412,69	39.716,86	119.993,59	104.442,00
4	Riau	57.306,79	35.587,40	30.158,92	97.921,45	586.508,08	535.745,88
5	Jambi	20.383,27	-	4.044,78	8.641,34	2.277,80	73,04
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	3.165,54	4.737,30	4.367,71	3.080,71	5.340,72	3.835,00
8	Lampung	-	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	1.198,88	11.792,00	17.769,11	-	28.734,49
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1.434.843,52	1.490.906,80	1.207.592,33	1.174.476,42	1.328.645,11	1.022.858,31
21	Kalimantan Barat	194.430,25	173.804,67	110.790,06	137.884,39	194.035,21	156.311,21
22	Kalimantan Selatan	2.109.439,11	2.152.555,50	1.870.241,37	22.334,77	16.569,08	17.622,01
23	Kalimantan Tengah	19.985,19	12.995,75	17.356,18	1.985.022,71	2.326.829,08	1.969.773,40
24	Kalimantan Utara	550.536,70	685.183,43	695.845,68	666.218,64	752.087,90	726.675,41
25	Sulawesi Utara	4.204,41	-	789,64	1.874,12	2.598,41	274,37
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	14.770,99	18.492,29	3.539,19	7.867,83	7.791,36	8.410,73
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	959,16	3.834,73	4.087,75
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	217.249,18	-	267.017,62	274.261,97	331.849,92	256.190,75
32	Maluku Utara	96.306,00	46.675,41	120.402,70	77.319,00	66.107,37	102.105,75
33	Papua	475.434,06	659.712,18	525.314,23	439.119,90	474.279,07	439.227,50
34	Papua Barat	469.328,92	152.738,52	408.388,99	417.206,34	753.116,93	777.309,37
JUMLAH		5.848.111,35	5.624.053,40	5.429.543,95	5.407.235,58	7.020.985,76	6.183.097,54

Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.8
PERKEMBANGAN PRODUKSI KAYU BULAT IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
(IUPHHK-HT) PER PROVINSI
TAHUN 2013 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014 m3	2015 m3	2016 m3	2017 m3	2018 m3	2019 m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	9.475,00	-	387,56
2	Sumatera Utara	-	2.275.514,65	1.526.498,92	1.189.321,22	1.291.648,82	1.191.713,51
3	Sumatera Barat	-	117.405,24	33.812,56	8.552,23	5.989,18	29.955,55
4	Riau	15.538.941,00	14.126.049,25	16.991.098,75	19.922.579,11	19.965.510,05	20.026.951,53
5	Jambi	2.195.535,00	3.602.604,52	3.611.675,07	4.253.704,15	4.957.023,57	4.960.977,77
6	Sumatera Selatan	1.613.548,00	7.849.082,05	3.972.863,53	6.660.237,35	7.699.530,59	7.635.824,69
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	76.347,04	3.557,37	-	5.040,00	46.293,22	87.837,85
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	1.563.159,00	3.005,10	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	3.149,00	3.026,20	3.846,66	4.843,57
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1.802.173,91	2.442.579,12	2.788.167,75	2.795.765,47	3.150.331,17	3.435.601,93
21	Kalimantan Barat	10.902,00	13.355,41	787.014,10	1.080.275,67	1.160.674,86	906.894,29
22	Kalimantan Selatan	-	131.329,10	102.509,56	75.404,24	17.249,81	11.351,39
23	Kalimantan Tengah	2.322.524,00	1.873.737,44	1.178.489,70	1.239.736,13	1.215.459,48	1.192.082,77
24	Kalimantan Utara	-	-	643.052,02	546.507,25	604.760,05	528.713,22
25	Sulawesi Utara	9.838,07	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	5.265,00	-	1.164,85	50,65
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	8.903,88	15.962,59	6.914,41
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	183,14	-	1.100,13
33	Papua	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
35	Perum Perhutani	918.587,00	791.345,00	548.096,00	-	809.934,00	-
JUMLAH		26.051.555,02	33.229.564,25	32.191.691,96	37.798.711,04	40.945.378,90	40.021.200,82

Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.9
PERKEMBANGAN TENAGA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
(IUPHHK-HA) PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014 Orang	2015 Orang	2016 Orang	2017 Orang	2018 Orang	2019 Orang
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	173	173	173	458	430	430
3	Sumatera Barat	182	191	206	432	432	432
4	Riau	317	325	382	64	458	458
5	Jambi	94	94	94	88	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	42	42
8	Lampung	-	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	5.756	5.596	5.597	3.498	2.768	3.242
21	Kalimantan Barat	2.306	2.293	3.327	2.080	1.749	1.708
22	Kalimantan Selatan	466	466	466	158	8	97
23	Kalimantan Tengah	7.826	7.823	7.891	8.072	8.201	8.619
24	Kalimantan Utara	-	-	-	2.175	1.971	1.965
25	Sulawesi Utara	34	34	34	-	-	-
26	Gorontalo	45	45	45	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	458	458	458	40	58	74
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	341	341	341	24	35	35
30	Sulawesi Tenggara	99	99	99	-	-	-
31	Maluku	879	879	1.026	529	891	891
32	Maluku Utara	-	-	-	334	567	602
33	Papua	2.078	2.078	2.073	494	760	768
34	Papua Barat	1.931	1.931	1.931	1.721	1.581	1.73
JUMLAH		22.985	22.826	24.143	20.167	19.951	21.145

Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

TABEL. 2.10
PERKEMBANGAN TENAGA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
INDUSTRI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					2019 Orang
		2014 Orang	2015 Orang	2016 Orang	2017 Orang	2018 Orang	
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	2.940	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	3.285	3.390	3.383	3.383	3.814	3.814
5	Jambi	1.585	1.569	1.633	1.633	1.647	1.647
6	Sumatera Selatan	3.728	3.688	7.797	7.763	5.316	5.316
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	68	68	68	68	68	68
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	74	74	74	74	74	74
11	Banten	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1.830	1.830	1.830	1.830	1.887	1.887
21	Kalimantan Barat	582	579	579	579	805	805
22	Kalimantan Selatan	279	279	279	279	279	279
23	Kalimantan Tengah	110	105	193	193	193	193
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	3	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	96	96	96	96	96	96
33	Papua	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		14.580	14.617	18.871	18.837	17.118	17.118

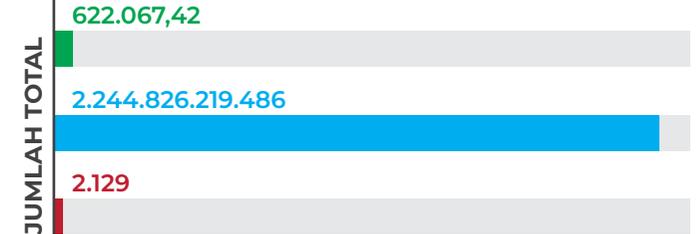
Sumber : Direktorat UHP, Ditjen PHPL

PERKEMBANGAN DAN INVESTASI IUPHHK-RESTORASI EKOSISTEM PER PROVINSI TAHUN 2019

Riau ■ 151.012 👤 1.068 ★ 1.013.404.246.000,00	Bengkulu ■ 12.655,82 👤 33 ★ 2.206.657.616,00	Jambi ■ 85.050 👤 322 ★ 506.344.584.417,00
Sumatera Selatan ■ 58.471 👤 435 ★ 54.895.894.661,00	Kalimantan Barat ■ 14.080 👤 10 ★ 4.556.250.000,00	Kalimantan Tengah ■ 214.348,77 👤 213 ★ 654.080.674.297,00
Kalimantan Timur ■ 86.450 👤 48 ★ 12.875.102.620,00		

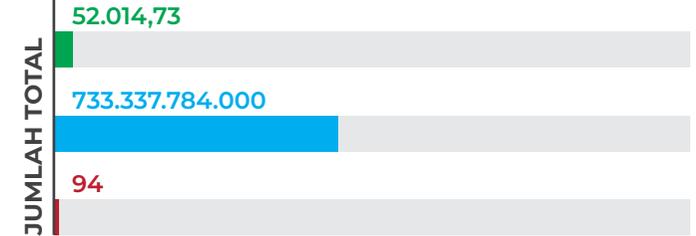
Legenda

- Luas (ha)
- ★ Investasi (IDR)
- 👤 Jumlah Karyawan (orang)



PERKEMBANGAN IUPJL DAN INVESTASI IUPJL TAHUN 2019

Sumatera Selatan ■ 22.280,00 👤 88 ★ 20.076.765.150,00	Kalimantan Tengah ■ 25.800,00 👤 6 ★ 20.076.765.150,00	Kepulauan Bangka Belitung ■ 30,00 👤 - ★ -
Kepulauan Riau ■ 3.458,73 👤 - ★ 693.494.500.000,00	Kalimantan Timur ■ 446,00 👤 - ★ -	Nusa Tenggara Barat ■ 40,63 👤 - ★ -



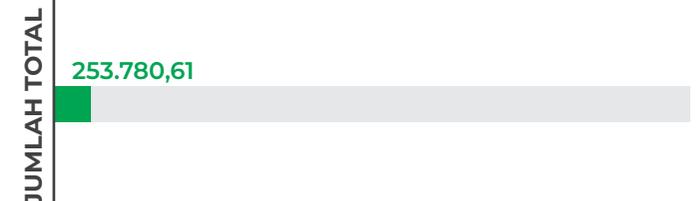
PERKEMBANGAN DAN INVESTASI IUPK-SP TAHUN 2019

Sumatera Utara ■ 73 👤 236 ★ 232.498.250.000,00	Lampung ■ 543 👤 40 ★ 1.500.000.000,00
--	---



PERKEMBANGAN DAN INVESTASI IUPHHBK-RESTORASI EKOSISTEM PER PROVINSI TAHUN 2019

Riau ■ 29.418,00	Papua ■ 50.580,00	Papua Barat ■ 165.055,00	Sulawesi Tenggara ■ 60,00
Sulawesi Barat ■ -	Nangroe Aceh Darussalam ■ 4.740,00	Sulawesi Selatan ■ 3.566,06	Gorontalo ■ 361,55



TABEL 3.1
PERKEMBANGAN DAN INVESTASI IUPHHK-RE PER PROVINSI TAHUN 2019

No.	Provinsi	Nama Perusahaan	Unit (UM)	Luas (ha)	Investasi		Tenaga Kerja (Orang)	Penanaman		Lokasi (Kabupaten/Kota)	SK IUPHHK-RE Nomor
					IDR	USD		(Ha)	(Batang)		
1	Riau	PT. Gemilang Cipta Nusantara	5	20.265,00	217.694.080.000,00		200,00	20,26	21,00	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.395/Menhut-II/2012
		PT. Gemilang Cipta Nusantara		20.450,00	239.451.896.000,00		39,00	12,43	6.556,00	Kepulauan Meranti	Kep. Menhut No. SK.825/Menhut-II/2013
		PT. Sinar Mutiara Nusantara		32.781,06	437.300.000.000,00		464,00	0,00	0,00	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.162/Menhut-II/2014 Jo. SK. MenLHK No. 567/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2018 (Tgl. 20 Agustus 2019)*
		PT. Global Alam Nusantara		36.850,00	39.905.375.000,00		165,00	0,00	0,00	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.230Menhut-II/2014
		PT. The Best One Unitimber		40.665,67	79.052.895.000,00		200,00	0,00	0,00	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.747Menhut-II/2014; Kep. Menteri LHK No SK. 515/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019
2	Bengkulu	PT. Sipef Biodiversity Indonesia	1	12.655,82	2.206.657.616,00	159.960,68	33,00	158,72	58.259,00	Mukomuko	Kep. Menhut No. SK.622Menhut-II/2013 jo. Kep. BKPM No. 10/1/IUPHHK-RE/PMDN/2017
3	Jambi	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	2	46.385,00	120.034.490.417,00		291,36	7.770,05	1.275.627,00	Batanghari	Kep. Menhut No. SK.327/Menhut-II/2010
		PT. Alam Bukit Tiga Puluh		38.665,00	386.310.094.000,00		31,00	0,00	0,00	Tebo	Kep. Ka. BKPM a.n. Menlkh No. 7/1/IUPHHK-RE/PMDN/2015
4	Sumatera Selatan	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	2	50.260,77	53.995.894.661,00		244,00	1.425,97	191.625,00	Musi Banyuasin	Kep. Menhut No. SK.293/Menhut-II/2007; Kep. Menteri LHK No. SK. 468/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2018 (06 Nov 2018)
		PT. Karawang Ekawana Nugraha		8.210,33	900.000.000,00		191,00	0,00	0,00	Ogan Komering Ilir	Kep. Menhut No. SK.142Menhut-II/2014; Kep. Menteri LHK No. SK. 281/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2018
5	Kalimantan Barat	PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari	1	14.080,00	4.556.250.000,00		10,00	0,00	0,00	Kubu Raya	Kep. Menhut No. SK.560/Menhut-II/2011
6	Kalimantan Tengah	PT. Rimba Raya Conservation	4	36.953,77		30.532.500,00	79,00	312,00	159.000,00	Seruyan	Kep. Menhut No. SK.735/Menhut-II/2013 jo. Kep. Men LHK. No. SK. 23/MenLHK/Sekjen/PLA.2/1/2018
		PT. Rimba Makmur Utama		108.255,00	82.261.733.421,00	5.528.135,00	55,00	653,00	6.464,00	Katingan	Kep. Menhut No. SK.734/Menhut-II/2013
		PT. Alam Sukses Lestari		19.520,00	106.470.000.000,00		79,00	0,00	0,00	Barito Timur	Keputusan Kepala BKPM Nomor 13/I/IUPHHK-RE/PMDN/2016
		PT. Rimba Makmur Utama		49.620,00	7.549.215.751,00	561.865,00	0,00	0,00	0,00	Kotawaringin Timur	Kep. MenLHK No. SK.23/1/IUPHHK-RE/PMDN/2016
7	Kalimantan Timur	PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (Eks	1	86.450,00	12.875.102.620,00	959.397,00	48,00	26,00	0,00	Kutai Timur	Kep. Menhut No. SK.464/Menhut-II/2010
TOTAL			16	622.067,42	1.790.563.684.486,00	37.741.857,68	2.129,36	10.378,43	1.697.552,00		

Sumber: Dit UJLHHBKHP, Ditjen PHPL

TABEL. 3.2
PERKEMBANGAN IUPJL DAN INVESTASI IUPJL TAHUN 2019

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi		SK / Tanggal
						IDR	USD	
1	PT. Global Alam Lestari	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	22.280,00	88		1.339.000,00	SK. 492/Menhut-II/2013 12 Juli 2013
2	PT. Hutan Amanah Lestari	Kalimantan Tengah	Barito Selatan dan Barito Timur	25.800,00	6		1.339.000,00	SK. 475/Menhut-II/2013 3 Juli 2013
3	Yayasan Alam Bukit Betung	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	30,00				SK. Gubernur No. 188.44/958/Dishut/2016 19 Oktober 2016
4	PT. Island Connections International	Kepulauan Riau	Karimun	18,64		12.150.000.000,00		SK. BPMPT No. 1778/BPMPT/SIUK.R-04/2016 30 Juni 2016
5	PT. Inhutani I Unit Labanan	Kalimantan Timur	Berau	446,00				SK. 5383/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 19 Oktober 2016
6	PT. Kepri Funtasy Resort	Kepulauan Riau	Karimun	1.388,81		341.106.000.000,00		SK. Gubernur No. 2170/Kpts-18/V/2018 28 Mei 2018
7	PT. Global Multindo Sejati	Kepulauan Riau	Kota Batam	303,13		81.912.000.000,00		SK. Gubernur No. 2171/Kpts-18/V/2018 28 Mei 2018
8	PT. Megah Puri Lestari	Kepulauan Riau	Kota Batam	33,38		88.862.500.000,00		SK. Gubernur No. 2172/Kpts-18/V/2018 28 Mei 2018
9	PT. Mustika Combol Indah	Kepulauan Riau	Karimun	1.714,77		169.464.000.000,00		SK. Gubernur No. 2173/Kpts-18/V/2018 28 Mei 2018
10	PT. Nusantara Oriental Permai	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	40,63				SK. DPMPTSP No. 503/01-I/03/IUPJLWA/DPMPTSP/2019 14 Januari 2019
JUMLAH				52.014,73	94	693.494.500.000,00	2.678.000,00	

Sumber: Direktorat UJLHHBK HP

TABEL. 3.3
PERKEMBANGAN DAN INVESTASI IUPK-SP TAHUN 2019

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten	Luas	Tenaga Kerja	Investasi	SK / Tanggal
				(Ha)	(Orang)	(IDR)	
1	PT. Sumatera Dairy Farm	Sumatera Utara	Tanah Karo	73	236	232.498.250.000,00	SK.605/Menhut-II/2011 21 Oktober 2011
2	PT. Penyelamat Alam Nusantara	Lampung	Lampung Selatan	543	40	1.500.000.000,00	SK.834/Menhut-II/2014 26 September 2014
JUMLAH				616	276	233.998.250.000,00	

Sumber: Dit. UJLHHBK HP

TABEL. 3.4
PERKEMBANGAN IUPHHBK PER PROVINSI TAHUN 2019

No.	Nama Perusahaan	SK IUPHHBK		Jenis HHBK	Luas (Ha)	Provinsi/Kabupaten	Masa Berlaku
		SK	TGL				
1	PT. National Sago Prima	IUPHHBK-HT SK.380/Menhut-II/2009 Jo SK.77/Menhut-II/2013	25-06-2009 04-02-2013	Sagu	21.418,00	Riau/Bengkalis	25 Tahun
2	PT. Agrindo Indonesia Jaya	IUPHHBK-HA SK Bupati Nomor 63 Tahun 2009 Tgl 20-10-2009, jo. SK Nomor : 522.5/90/BUP/IX/2013	13-09-2013	Sagu	39.920,00	Papua/Mamberamo Raya	8 Tahun
3	PT. Austrindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Papua	IUPHHBK-HA SK Bupati Sorong Selatan No. 86 Tahun 2010	12 Mei 2010	Sagu	40.000,00	Papua Barat/Sorong Selatan	25 Tahun
4	PT. Nusantara Sago Prima	IUPHHBK-HA SK Bupati No.45 Tahun 2011	25-03-2011	Sagu	10.660,00	Papua/Jayapura	20 Tahun
5	PT. Tunas Pangan Saguindo	IUPHHBK-HA SK Bupati No.5/2011	24-01-2011	Sagu	54.000,00	Papua Barat/Telu Bintuni	25 Tahun
6	PT. Tugu Palma Sejati	IUPHHBK-HA SK Bupati No.6/2011	24-9-2011	Sagu	55.000,00	Papua Barat/Teluk Bintuni	25 Tahun
7	KUD. Tunas Sari	IUPHHBK-HT SK. Bupati Konawe Nomor 475 Tahun 2011	05-08-2011	Getah Pinus	30,00	Sulawesi Tenggara/Konawe	10 Tahun
8	Perum PERHUTANI	IUPHHBK-HA SK Bupati Sorong Selatan No.522.223/B55/XII Tahun 2012	14-12-2012	Sagu	16.055,00	Papua Barat/Sorong Selatan	25 Tahun
9	PT. Sinar Beru-Beru	IUPHHBK-HA SK. Bupati Nomor : 522.22/KPTS-182/XII/2012	18-12-2012	Rotan	0,00	Sulawesi Barat/Mamasa	10 Tahun
10	KUD. Tunas Sari	IUPHHBK-HT SK. Bupati Muna Nomor 427 Tahun 2013	22-07-2013	Getah Pinus	30,00	Sulawesi Tenggara/Muna	10 Tahun
11	PT. First Flower	IUPHHBK-HA SK. Bupati Kep. Meranti Nomor 132 Tahun 2013	01-08-2013	Nipah	8.000,00	Riau/Kep. Meranti	10 Tahun
12	PD. Pembangunan Tanoh Gayo	IUPHHBK-HA SK Gubernur No. 522.614/BP2T/1046/IUPHHBK/V/201 4	23-05-2014	Getah Pinus	4.740,00	Nanggroe Aceh Darussalam/Aceh Tengah	25 Tahun
13	PT. Adimitra Pinus Utama	IUPHHBK-HT SK. Gubernur Nomor : 1/L.15/PTSP/2018	09-07-2018	Getah Pinus	3.566,06	Sulawesi Selatan/Gowa	20 Tahun
14	Koperasi Pinus Jaya Sejahtra	IUPHHBK-HT SK. Gubernur Nomor : 36/DPMESDM- TRANS/SK/IUPHHBK/V/2018	21-05-2018	Getah Pinus	361,55	Gorontalo/Gorontalo	20 Tahun
TOTAL LUAS					253.780,61		

**TABEL 3.5
PRODUKSI HHBK TAHUN 2019**

NO	PROVINSI	KELOMPOK KOMODITAS HHBK (TON)										JUMLAH
		KEL. ROTAN	KEL. BAMBU	KEL. GETAH	KEL.DAMAR	KEL. DAUN DAN AKAR	KEL. BIJI-BIJIAN	KEL. KULIT KAYU	KEL. BUAH-BUAHAN & UMBI-UMBIAN	KEL. ATAP	KEL. LAINNYA	
1	ACEH	910,60	-	9.448,77	-	-	-	-	304,10	-	-	10.663,47
2	SUMATERA UTARA	123,13	-	7.575,57	49,00	108,18	-	24,50	24.504,90	-	-	32.385,28
3	SUMATERA BARAT	995,47	-	321,79	-	-	-	-	-	-	208,97	1.526,23
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178,61	1.178,61
5	JAMBI	138,32	-	4.071,22	-	-	0,50	-	1.043,99	-	0,34	5.254,37
6	SUMATERA SELATAN	-	-	554,05	-	-	14,29	-	-	-	-	568,34
7	BENGKULU	-	-	38,14	-	-	-	-	-	-	-	38,14
8	LAMPUNG	-	-	2.865,97	-	-	-	-	3.947,81	-	133.191,44	140.005,22
9	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	613,86	-	-	613,86
11	BANTEN	-	39,27	60,65	-	151,95	186,34	-	13,84	-	-	452,05
12	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
13	JAWA BARAT	-	96,51	42.852,22	30,39	7.719,18	1.097,27	-	13,79	-	938,33	52.747,70
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	3.978,59	-	-	-	-	-	3.978,59
15	JAWA TENGAH	75,50	42,00	21.073,08	113,32	9.410,41	44.909,63	-	4.792,75	-	9.941,01	90.357,70
16	JAWA TIMUR	-	200,40	18.283,97	137,25	16.183,85	42.646,78	-	1.373,97	-	8.647,61	87.473,84
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18	BARAT	421,17	139,50	-	-	-	266,03	10,50	-	-	0,16	837,36
19	TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20	KALIMANTAN TIMUR	-	-	650,67	-	-	122,93	-	5,00	-	-	778,60
21	KALIMANTAN BARAT	-	-	239,68	211,00	-	-	-	-	-	-	450,68
22	KALIMANTAN SELATAN	4,55	55,89	1.525,95	56,00	26,37	274,40	9,50	246,13	-	167,67	2.366,44
23	KALIMANTAN TENGAH	18,54	-	-	-	-	-	-	27.927,41	-	0,16	27.946,11
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
25	SULAWESI UTARA	180,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	220,00
26	GORONTALO	540,00	-	143,63	20,00	-	-	-	-	-	-	703,63
27	SULAWESI TENGAH	660,00	-	40,00	265,00	-	-	-	-	-	-	965,00
28	SULAWESI SELATAN	25,00	-	3.816,17	150,22	-	-	-	-	-	-	3.991,39
29	SULAWESI BARAT	221,10	-	538,16	6,00	-	-	-	-	-	-	765,26
30	SULAWESI TENGGARA	80,00	-	137,01	-	-	-	-	-	-	-	217,01
31	MALUKU	-	-	-	175,23	120,00	-	-	-	-	-	295,23
32	MALUKU UTARA	-	-	-	109,00	4,00	-	-	-	-	7,50	120,50
33	PAPUA	-	-	-	290,32	-	-	466,53	-	-	260,88	1.017,73
34	PAPUA BARAT	-	-	-	20,00	-	-	6,00	-	-	6.254,56	6.280,56
TOTAL		4.393,38	573,57	114.236,70	1.672,73	37.702,52	89.518,17	517,03	64.787,55	0,00	160.797,24	474.198,89

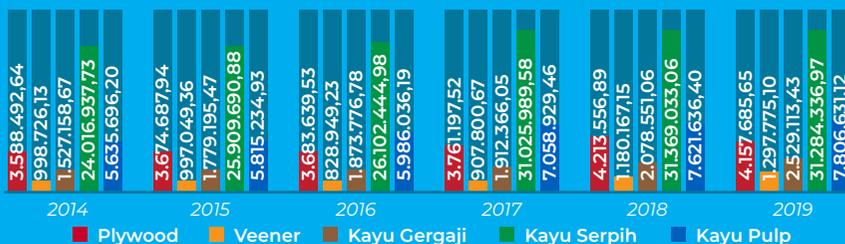
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN TAHUN 2019

Nangroe Aceh Darussalam 6.910,50 10.656,16 † 50 -	Bengkulu 14.381,66 23.581,03 † 821 2.152.027,40	Jawa Barat 124.501,83 214.700,65 † 9.589 387.111.795,41	Nusa Tenggara Timur - - † - 251.524,00	Sulawesi Utara - - † - 37.250,00	Maluku 17.414,02 21.302,39 † 5.889 1.249.209,86
Sumatera Utara 1.795.933,56 2.071.845,67 † 13.692 295.974.695,50	Lampung 172.703,73 276.504,99 † 4.555 9.995.684,79	DI Yogyakarta 7.658,78 11.016,35 † 469 61.665.384,69	Kalimantan Timur 463.082,69 1.051.444,54 † 29.339 185.750.975,64	Gorontalo 1.179,19 6.014,41 † - 39.893,45	Maluku Utara 5.757,57 8.011,20 † 3.504 20.723,17
Sumatera Barat 1.904,79 2.600,11 † - 694.197,03	Kep. Riau - 3.157,87 † 1.578 8.998.662,27	Jawa Tengah 1.827.104,92 3.096.955,62 † 63.426 1.486.065.269,05	Kalimantan Barat 218.134,60 469.673,75 † 16.524 101.666.614,59	Sulawesi Tengah 20.434,19 29.614,81 † 221 3.065.489,65	Papua 325.843,32 660.812,15 † 7.299 133.784.249,10
Riau 20.551.815,76 23.964.671,31 † 26.941 556.483.004,06	Kep. Bangka Belitung - - † - -	Jawa Timur 2.608.778,65 4.069.512,22 † 82.451 1.677.229.104,09	Kalimantan Selatan 512.771,59 955.700,90 † 26.916 217.298.338,02	Sulawesi Selatan 196.111,21 322.285,07 † 5.569 33.092.263,31	Papua Barat 194.026,75 282.982,09 † 4.342 7.700.722,55
Jambi 4.271.949,76 4.115.113,83 † 20.418 287.490.491,96	Banten 230.331,94 112.984,30 † 8.760 217.580.636,93	Bali 14.435,84 24.429,36 † 200 88.778.241,45	Kalimantan Tengah 806.894,35 1.044.680,12 † 9.939 57.293.139,23	Sulawesi Barat - - † 11 -	Legenda ■ Produksi Kayu Olahan per Provinsi (Ton) 📦 Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat IUIPHHK (m ³) † Perkembangan Tenaga Kerja IUIPHHK (orang) ➡ Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan per Provinsi (USD)
Sumatera Selatan 12.482.964,45 13.345.475,47 † 7.277 1.403.958.193,68	DKI Jakarta - - † 696 4.330.107.835,22	Nusa Tenggara Barat 1.990,78 3.413,49 † - -	Kalimantan Utara 186.136,67 379.408,06 † 4.573 77.001.455,45	Sulawesi Tenggara 14.389,17 19.117,26 † - -	

PERKEMBANGAN PASOKAN KAYU BULAT UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI PER SUMBER BAHAN BAKU TAHUN 2019 (M³)



REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU KAYU BULAT IUIPHHK PER JENIS PRODUKSI TAHUN 2019 (M³)



PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER JENIS PRODUK TAHUN 2019 (USD)

Panel 2.148.431.188,97	Woodworking 1.144.156.550,45	Furnitur Kayu 1.428.778.504,40	Kertas 3.868.917.652,64
Serpih Kayu (Chipwood) 57.389.329,19	Bangunan Prefabrikasi 5.597.669,52	Pulp 2.778.695.819,30	Veneer 91.979.157,80
Kerajinan Kayu 99.493.588,87			

PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER NEGARA TUJUAN EKSPOR TAHUN 2019 (USD)

Tiongkok 2.880.950.110,02	Jepang 1.366.453.646,44	Amerika Serikat 1.359.596.182,05	Korea Selatan 711.136.154,62	India 496.896.133,94
Australia 316.190.658,78	Malaysia 376.732.877,19	Taiwan 305.563.242,09	Britania Raya 278.316.676,67	Arab Saudi 180.493.132,37
Vietnam 288.595.634,00	Belanda 220.258.600,58	Filipina 201.735.531,85	Bangladesh 173.962.453,57	Thailand 163.910.288,11
Jerman 155.506.180,87	Uni Emirat Arab 200.073.315,27	Turki 131.711.984,22	Lain-Lain 1.824.454.268,91	

TABEL 4.1
JUMLAH PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
KAPASITAS IZIN PRODUKSI DIATAS 6.000 M3/ TAHUN
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	Nangroe Aceh Darussalam	1	1	1	1	1	1
2	Sumatera Utara	30	32	35	38	39	40
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	22	22	23	26	26	27
5	Jambi	23	23	25	30	32	32
6	Sumatera Selatan	14	16	16	16	16	17
7	Bengkulu	2	2	2	2	2	2
8	Lampung	4	4	4	5	6	9
9	Kep.Riau	1	1	1	1	1	1
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	4	5	5	5	5	5
12	DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1
13	Jawa Barat	14	15	19	20	20	20
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	1	1
15	Jawa Tengah	61	70	81	95	99	111
16	Jawa Timur	89	99	109	123	129	145
17	Bali	1	1	1	1	1	1
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	41	41	41	44	44	45
21	Kalimantan Barat	12	12	15	15	15	16
22	Kalimantan Selatan	28	28	30	30	31	31
23	Kalimantan Tengah	16	16	19	20	20	22
24	Kalimantan Utara	7	7	7	7	7	7
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1	1
28	Sulawesi Selatan	6	6	6	6	6	6
29	Sulawesi Barat	-	-	-	1	1	1
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	4	4	4	4	4	4
32	Maluku Utara	2	2	2	2	2	2
33	Papua	8	10	10	12	13	13
34	Papua Barat	9	9	9	12	13	13
JUMLAH		401	428	467	518	536	574

TABEL 4.2
TOTAL KAPASITAS IZIN PRODUKSI PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS IZIN PRODUKSI DIATAS 6.000 M3/ TAHUN
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		M3/ Tahun					
1	Nangroe Aceh Darussalam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Sumatera Utara	2.027.302,00	2.082.302,00	2.144.802,00	2.253.502,00	2.667.402,00	2.692.402,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	23.394.393,00	23.394.393,00	23.414.393,00	23.495.593,00	23.495.593,00	23.505.593,00
5	Jambi	8.430.520,00	8.440.520,00	8.598.520,00	8.907.120,00	8.960.870,00	8.960.870,00
6	Sumatera Selatan	2.201.216,00	11.408.416,00	11.408.416,00	11.653.000,00	11.653.000,00	11.781.840,00
7	Bengkulu	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
8	Lampung	203.500,00	203.500,00	203.500,00	217.500,00	457.500,00	587.500,00
9	Kep.Riau	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	569.960,00	638.210,00	638.210,00	638.210,00	638.210,00	638.210,00
12	DKI Jakarta	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
13	Jawa Barat	518.500,00	542.200,00	697.200,00	814.200,00	814.200,00	814.200,00
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	73.200,00	73.200,00
15	Jawa Tengah	3.430.250,00	4.179.950,00	4.900.383,00	5.953.363,00	6.314.363,00	7.150.963,00
16	Jawa Timur	3.750.370,00	4.321.250,00	5.488.118,00	6.445.448,00	6.705.648,00	8.077.673,00
17	Bali	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	10.168.191,00	10.236.691,00	10.240.441,00	10.780.404,00	10.780.404,00	10.967.464,00
21	Kalimantan Barat	1.711.243,00	1.711.243,00	1.960.603,00	1.960.603,00	1.960.603,00	2.119.603,00
22	Kalimantan Selatan	4.201.195,00	4.201.195,00	4.253.695,00	4.253.695,00	4.306.919,00	4.306.919,00
23	Kalimantan Tengah	2.149.316,00	2.149.316,00	2.247.116,00	2.306.116,00	2.306.116,00	2.646.416,00
24	Kalimantan Utara	1.824.972,45	1.824.972,45	1.824.972,45	1.824.972,45	1.824.972,45	1.824.972,45
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	Sulawesi Selatan	646.960,00	672.960,00	672.960,00	672.960,00	672.960,00	642.960,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00
32	Maluku Utara	511.200,00	511.200,00	511.200,00	511.200,00	511.200,00	511.200,00
33	Papua	3.073.000,00	3.209.400,00	3.209.400,00	3.411.632,00	3.519.632,00	3.519.632,00
34	Papua Barat	1.357.536,00	1.357.536,00	1.357.536,00	1.460.536,00	1.490.536,00	1.515.536,00
JUMLAH		70.989.724,45	81.905.354,45	84.591.565,45	88.387.354,45	89.980.628,45	93.164.453,45

TABEL 4.3
INVESTASI IUIPHK KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR
1	Nangroe Aceh Darussalam	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2	Sumatera Utara	1.630.260.515.816,00	1.640.510.515.816,00	1.697.636.768.816,00	1.708.498.643.318,00	1.995.306.673.474,00	1.997.484.276.845,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	19.204.118.794.395,20	19.204.118.794.395,20	19.211.396.394.395,20	19.248.981.394.395,20	19.248.981.394.395,20	19.254.236.394.395,20
5	Jambi	2.688.069.822.421,37	2.692.069.822.421,37	2.700.624.822.421,37	2.746.674.822.421,37	2.800.174.822.421,37	2.800.174.822.421,37
6	Sumatera Selatan	4.847.603.013.016,00	6.202.335.013.016,00	6.202.335.013.016,00	6.202.335.013.016,00	6.202.335.013.016,00	6.886.508.103.551,00
7	Bengkulu	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00
8	Lampung	384.000.000.000,00	384.000.000.000,00	384.000.000.000,00	384.000.000.000,00	747.635.000.000,00	778.232.875.000,00
9	Kep.Riau	212.002.700.000,00	212.002.700.000,00	212.002.700.000,00	212.002.700.000,00	212.002.700.000,00	212.002.700.000,00
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	233.947.827.148,00	248.947.827.148,00	248.947.827.148,00	248.947.827.148,00	248.947.827.148,00	248.947.827.148,00
12	DKI Jakarta	92.091.600.000,00	92.091.600.000,00	92.091.600.000,00	92.091.600.000,00	92.091.600.000,00	92.091.600.000,00
13	Jawa Barat	349.188.166.277,00	358.788.166.277,00	444.895.686.277,00	521.463.686.277,00	521.463.686.277,00	521.463.686.277,00
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	9.691.450.000,00	9.691.450.000,00
15	Jawa Tengah	2.948.826.173.695,00	3.332.359.054.354,00	3.609.605.700.137,00	3.815.114.864.908,00	3.902.043.739.908,00	4.232.054.053.008,00
16	Jawa Timur	2.297.677.335.426,00	2.519.804.708.140,00	3.284.968.924.562,00	4.123.815.197.163,00	4.408.012.662.096,00	5.290.023.205.379,00
17	Bali	7.509.500.000,00	7.509.500.000,00	7.509.500.000,00	7.509.500.000,00	7.509.500.000,00	7.509.500.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	11.052.914.079.471,00	11.247.741.880.600,00	11.249.276.445.600,00	12.368.708.945.600,00	12.368.708.945.600,00	12.538.708.945.600,00
21	Kalimantan Barat	801.018.273.538,31	801.018.273.538,31	1.049.411.215.538,31	1.049.411.215.538,31	1.049.411.215.538,31	1.346.211.215.538,31
22	Kalimantan Selatan	1.868.734.811.407,00	1.868.734.811.407,00	1.960.198.855.695,00	1.960.198.855.695,00	2.038.860.855.695,00	2.038.860.855.695,00
23	Kalimantan Tengah	1.780.213.903.782,00	1.780.213.903.782,00	1.923.093.781.811,00	1.961.093.781.811,00	1.961.093.781.811,00	2.607.846.305.811,00
24	Kalimantan Utara	958.467.576.501,00	958.467.576.501,00	966.567.576.501,00	966.567.576.501,00	966.567.576.501,00	966.567.576.501,00
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	6.736.025.379,00	6.736.025.379,00	6.736.025.379,00	6.736.025.379,00	6.736.025.379,00	6.736.025.379,00
28	Sulawesi Selatan	394.577.300.000,00	407.082.683.521,00	407.082.683.521,00	407.082.683.521,00	407.082.683.521,00	407.032.683.521,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	7.964.175.000,00	7.964.175.000,00	7.964.175.000,00
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	238.553.093.360,00	238.553.093.360,00	238.553.093.360,00	238.553.093.360,00	673.265.447.000,00	673.265.447.000,00
32	Maluku Utara	673.265.447.000,00	673.265.447.000,00	673.265.447.000,00	673.265.447.000,00	238.553.093.360,00	238.553.093.360,00
33	Papua	2.119.491.316.300,00	2.193.633.716.300,00	2.193.633.716.300,00	2.140.748.122.713,00	2.140.748.122.713,00	2.140.748.122.713,00
34	Papua Barat	818.328.845.019,00	818.328.845.019,00	818.328.845.019,00	954.893.845.019,00	969.893.845.019,00	974.710.575.942,00
JUMLAH		55.722.596.119.951,90	58.003.313.957.974,90	59.697.162.622.496,90	62.161.659.015.783,90	63.340.081.835.872,90	66.392.625.516.084,90

Sumber : Direktorat PPHH, Ditjen PHPL

TABEL 4.4
TENAGA KERJA IUIPHHK KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Nangroe Aceh Darussalam	50	50	50	50	50	50
2	Sumatera Utara	12.356	12.889	13.285	13.514	13.832	13.692
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	26.430	26.430	26.509	26.834	26.834	26.941
5	Jambi	18.516	18.498	18.551	19.617	19.937	20.418
6	Sumatera Selatan	6.060	6.866	6.866	6.866	6.866	7.277
7	Bengkulu	821	821	821	821	821	821
8	Lampung	3.966	3.966	3.966	4.011	4.172	4.555
9	Kep.Riau	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	8.266	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
12	DKI Jakarta	696	696	696	696	696	696
13	Jawa Barat	8.242	8.442	9.089	9.589	9.589	9.589
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	469	469
15	Jawa Tengah	46.543	53.500	56.648	58.584	59.764	63.426
16	Jawa Timur	56.543	58.748	66.287	71.294	73.084	82.451
17	Bali	200	200	200	200	200	200
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	27.472	28.407	28.438	28.808	28.808	29.339
21	Kalimantan Barat	15.663	15.663	16.163	16.163	16.163	16.524
22	Kalimantan Selatan	26.448	26.448	26.808	26.808	26.916	26.916
23	Kalimantan Tengah	7.883	7.883	8.729	9.129	9.129	9.939
24	Kalimantan Utara	4.491	4.491	4.573	4.573	4.573	4.573
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	221	221	221	221	221	221
28	Sulawesi Selatan	5.236	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569
29	Sulawesi Barat	-	-	-	11	11	11
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	5.889
32	Maluku Utara	5.889	5.889	5.889	5.889	5.889	3.504
33	Papua	5.877	6.197	6.197	7.299	7.299	7.299
34	Papua Barat	4.016	4.016	4.016	4.220	4.280	4.342
JUMLAH		296.967	309.732	323.413	334.608	339.014	355.049

Sumber : Direktorat PPHH, Ditjen PHPL

TABEL 4.5
REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU KAPASITAS IZIN DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER SUMBER BAHAN BAKU
TAHUN 2014-2019

No	Sumber Bahan Baku	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	IUPHHK-HA	5.337.115,45	5.679.787,83	5.428.801,68	4.739.399,43	4.895.796,66	4.926.593,87
2	IUPHHK-HT (Kayu Tanaman)	29.513.695,39	32.317.717,54	32.586.666,61	37.512.959,66	40.079.339,02	39.822.461,36
3	IUPHHK-HT (Pemanfaatan Kayu Penyiapan Lahan Penanaman)	3.375.904,82	1.888.987,27	264.160,40	430.669,89	610.564,84	468.957,45
4	IPK	650.466,70	580.628,47	438.982,99	404.057,05	533.285,64	503.385,49
5	Perum Perhutani	160.370,59	149.498,28	112.735,56	144.931,09	183.135,04	270.114,26
6	Hutan Rakyat - Tanaman Budidaya	5.200.614,37	5.099.927,95	4.936.513,97	5.283.903,50	6.012.594,82	7.563.649,27
7	Hutan Rakyat - Kayu Tumbuh Alami	190.660,96	130.544,04	85.630,99	55.841,47	60.282,31	189.041,03
8	Perkebunan Rakyat / Swasta	792.226,34	755.118,45	915.621,48	1.214.389,21	1.328.862,09	1.538.853,20
9	Impor	406.565,15	625.494,41	891.864,06	1.320.725,27	808.173,62	650.329,96
10	Industri Lain	848.750,55	530.009,15	516.574,81	537.806,03	634.891,72	748.416,60
11	Pedagang / TPT KB	71.383,64	251.410,39	362.735,17	609.878,42	764.742,05	657.316,37
JUMLAH		46.547.753,94	48.009.123,80	46.540.287,71	52.254.561,01	55.911.667,82	57.339.118,86

TABEL 4.6
RELASISI PEMENUHAN BAHAN BAKU KAPASITAS IZIN DIATAS 6.000M3/TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	165,77	501,36	-	237,26	10.340,09
2	Sumatera Utara	1.668.730,98	1.587.420,01	1.599.503,98	1.792.380,09	2.039.351,48	2.049.951,75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	2.842,03
4	Riau	23.713.392,64	24.776.736,36	24.588.943,71	24.972.191,45	24.645.757,31	23.770.798,40
5	Jambi	3.817.612,86	4.216.278,54	4.141.684,67	4.077.845,64	4.032.534,98	4.003.836,66
6	Sumatera Selatan	2.600.807,83	3.164.917,12	3.153.952,05	8.948.622,75	12.372.421,16	13.488.418,91
7	Bengkulu	17.815,55	20.486,23	8.519,50	1.821,67	1.129,11	24.555,39
8	Lampung	72.798,64	67.334,13	38.882,23	28.985,80	49.614,64	266.288,77
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	3.783,73
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	78.916,52	115.898,68	153.813,11	109.525,76	113.986,60	105.872,71
12	DKI Jakarta	-	2.550,22	-	-	-	-
13	Jawa Barat	149.139,50	184.900,06	205.773,83	137.079,53	173.052,52	271.399,44
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	4.345,73	11.521,79
15	Jawa Tengah	2.256.408,17	2.704.675,42	2.882.664,37	2.887.757,55	3.247.898,89	3.349.474,43
16	Jawa Timur	3.129.436,01	3.052.834,23	2.954.579,74	3.278.695,65	3.578.324,51	4.394.279,80
17	Bali	31.427,37	33.981,84	25.424,11	20.231,72	20.545,66	28.144,17
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	3.452,47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	4.006.361,30	3.440.417,23	2.525.913,46	1.662.047,26	1.203.215,49	1.056.910,41
21	Kalimantan Barat	739.232,65	795.882,53	777.589,95	663.970,07	670.296,18	547.751,92
22	Kalimantan Selatan	984.014,67	996.208,12	1.029.463,44	939.209,41	1.090.300,68	1.042.192,09
23	Kalimantan Tengah	1.460.290,28	989.561,52	929.934,39	1.217.361,98	1.066.007,57	1.093.021,51
24	Kalimantan Utara	401.803,42	410.227,03	350.775,22	336.429,14	386.663,68	400.808,16
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	7.317,39
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	29.342,35
28	Sulawesi Selatan	337.000,93	286.716,47	240.606,91	296.894,09	346.783,34	302.760,37
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	21.867,07
31	Maluku	8.125,04	3.511,08	2.503,73	6.555,61	10.536,21	23.283,57
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	8.902,93
33	Papua	800.260,07	894.431,71	719.353,44	654.009,79	607.513,06	732.485,59
34	Papua Barat	274.179,50	264.098,42	210.060,30	222.946,04	251.151,75	287.514,95
	JUMLAH	46.547.753,94	48.009.232,71	46.540.443,51	52.254.561,01	55.911.667,82	57.339.118,85

TABEL 4.7
REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER JENIS PRODUK
TAHUN 2014 - 2019

No	Jenis Produksi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	Kayu Lapis dan LVL	5.842.482,54	6.338.828,23	6.453.916,37	6.450.949,15	7.110.110,22	6.947.802,09
2	Veneer	1.639.994,37	1.590.642,97	1.342.960,18	1.504.786,51	1.943.131,47	2.171.384,00
3	Kayu Gergajian	2.783.643,93	3.034.240,11	3.118.818,61	3.181.708,39	3.536.651,50	4.305.442,41
4	Serpih Kayu dan Pulp	36.077.818,96	35.323.302,85	35.183.352,45	40.650.812,91	42.243.548,68	43.049.471,95
5	Produk Lain	5.951,00	-	23.671,63	36.496,12	-	123.564,74
JUMLAH		46.349.890,80	46.287.014,16	46.122.719,24	51.824.753,07	54.833.441,87	56.597.665,19

TABEL 4.8
REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	10.656,16
2	Sumatera Utara	1.567.102,26	1.727.101,72	1.601.089,32	1.779.217,54	639.722,80	2.071.845,67
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	1.450.315,76	2.600,11
4	Riau	24.331.241,70	24.599.204,92	24.662.776,84	25.490.467,54	24.261.634,27	23.964.671,31
5	Jambi	4.274.277,17	3.933.118,22	4.271.122,11	4.162.229,32	3.955.042,32	4.115.113,83
6	Sumatera Selatan	2.440.347,48	2.976.936,80	3.085.032,37	8.430.670,05	12.252.832,20	13.345.475,47
7	Bengkulu	17.165,57	20.823,81	7.462,19	500,28	7.771,31	23.581,03
8	Lampung	69.576,20	68.939,69	39.313,32	28.552,42	84.661,19	276.504,99
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	3.157,87
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	91.083,79	108.455,93	155.270,07	109.137,10	131.417,56	112.984,30
12	DKI Jakarta	-	2.550,22	-	-	-	-
13	Jawa Barat	139.389,41	179.710,76	208.687,45	170.272,04	217.760,50	214.700,65
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	4.091,65	11.016,35
15	Jawa Tengah	1.964.149,58	2.361.235,65	2.544.087,58	2.636.388,60	3.037.619,56	3.096.955,62
16	Jawa Timur	2.586.610,53	2.639.866,76	2.666.956,40	3.078.717,89	3.461.339,51	4.069.512,22
17	Bali	34.669,57	30.431,29	28.652,35	24.851,54	18.847,69	24.429,36
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	3.413,49
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	4.161.073,43	3.336.066,62	2.669.821,37	1.657.738,27	1.156.104,66	1.051.444,54
21	Kalimantan Barat	655.523,61	669.702,14	668.416,71	637.482,85	505.294,35	469.673,75
22	Kalimantan Selatan	812.522,40	868.310,64	955.084,26	914.398,08	953.326,88	955.700,90
23	Kalimantan Tengah	1.436.340,43	988.930,94	988.377,99	1.211.563,84	1.086.929,29	1.044.680,12
24	Kalimantan Utara	351.946,32	374.469,07	347.345,80	301.594,70	351.064,72	379.408,06
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	7.370,54	6.014,41
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	29.614,81
28	Sulawesi Selatan	347.585,70	285.630,54	242.196,83	292.485,71	332.096,66	322.285,07
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	19.117,26
31	Maluku	8.710,48	3.379,89	2.503,73	6.448,73	10.265,54	21.302,39
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	8.011,20
33	Papua	792.364,45	855.852,90	754.005,04	694.227,68	634.747,30	660.812,15
34	Papua Barat	268.210,70	256.295,66	224.517,51	197.808,89	273.185,61	282.982,09
	JUMLAH	46.349.890,80	46.287.014,16	46.122.719,24	51.824.753,07	54.833.441,87	56.597.665,19

TABEL 4.9
PRODUKSI KAYU LAPIS DAN LAMINATED VENEER LUMBER (LVL)
DARI IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	23.857,97	27.833,41	34.663,20	27.689,29	44.335,21	37.291,99
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	116.331,44	117.685,10	103.383,88	77.637,44	63.826,76	54.956,65
5	Jambi	93.822,96	105.327,00	87.227,49	98.121,86	135.835,77	140.534,64
6	Sumatera Selatan	25.416,64	26.723,53	22.121,00	23.278,92	34.221,79	30.205,46
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	1.697,25
8	Lampung	-	-	-	-	-	17.327,14
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	218.036,35	176.183,01	145.447,23	159.399,00	196.894,41	198.616,23
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	10.143,33	13.587,53	33.683,32	43.664,33	47.424,34	51.435,25
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	559.625,00	649.351,13	738.849,21	838.669,13	969.246,99	931.167,62
16	Jawa Timur	777.228,89	749.283,65	737.050,07	825.927,61	1.043.903,03	1.181.812,62
17	Bali	5.995,39	5.998,18	5.122,79	4.947,65	7.789,48	4.379,57
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	1.990,78
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	415.345,95	458.177,99	473.296,34	387.487,91	437.710,03	371.668,25
21	Kalimantan Barat	247.267,92	253.732,80	246.510,11	243.818,25	230.155,16	200.890,78
22	Kalimantan Selatan	410.729,82	416.112,57	472.545,56	460.236,31	459.080,29	433.582,94
23	Kalimantan Tengah	169.041,60	164.783,27	122.209,23	112.662,37	78.550,77	44.197,51
24	Kalimantan Utara	143.309,02	124.994,82	138.768,73	132.147,45	143.607,66	147.696,41
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	211,51
28	Sulawesi Selatan	127.281,17	103.546,83	81.620,30	104.520,94	111.485,56	103.146,50
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	305,70	1.010,84	1.470,44	2.428,43	2.910,03	4.897,03
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua	243.660,31	279.573,63	238.624,38	217.144,74	206.579,61	199.680,42
34	Papua Barat	1.093,18	782,64	1.046,25	1.415,89	-	299,10
JUMLAH		3.588.492,64	3.674.687,94	3.683.639,53	3.761.197,52	4.213.556,89	4.157.685,65

Sumber : Direktorat PPHH, Ditjen PHPL

TABEL 4.10
PRODUKSI VENEER DARI IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	5.599,99
2	Sumatera Utara	676,10	1.307,58	6.611,70	18.879,36	22.795,27	24.822,95
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	255,15	3.927,47	7.235,56
5	Jambi	24.916,47	36.503,59	25.112,11	32.495,75	49.919,79	55.374,40
6	Sumatera Selatan	30.825,59	47.921,03	31.320,42	33.592,54	50.427,38	69.042,90
7	Bengkulu	11.593,40	14.484,03	2.629,41	-	-	-
8	Lampung	34.095,70	37.295,98	22.956,02	16.232,18	27.969,57	32.772,14
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	1.413,44	1.592,15	10.708,85	-	2,72	3.391,29
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	21.269,64	30.341,40	30.107,20	27.542,51	61.454,96	42.629,20
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	1.166,65
15	Jawa Tengah	306.131,44	274.068,56	240.484,60	253.220,89	349.013,75	345.721,86
16	Jawa Timur	363.381,48	329.786,95	275.662,20	359.536,24	442.637,72	536.612,77
17	Bali	-	-	-	-	-	2.501,00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	64,62	215,66	-	7.642,51	9.543,96	8.028,77
21	Kalimantan Barat	41.587,29	36.868,11	28.332,31	22.823,33	8.747,74	6.959,77
22	Kalimantan Selatan	28.310,90	42.227,67	43.076,70	32.175,75	23.767,65	23.583,65
23	Kalimantan Tengah	23.707,99	21.877,49	13.254,78	19.902,91	31.598,03	29.281,02
24	Kalimantan Utara	93,27	404,83	329,65	654,96	647,40	602,46
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	535,11
28	Sulawesi Selatan	72.907,59	79.746,53	66.598,16	68.551,14	77.795,49	78.242,93
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	4.421,09	584,09	1.234,12	3.340,17	4.815,92	7.134,91
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	9.449,83	-	-	-
34	Papua Barat	33.330,13	41.823,72	21.081,17	10.955,30	15.102,33	16.535,77
JUMLAH		998.726,13	997.049,36	828.949,23	907.800,67	1.180.167,15	1.297.775,10

TABEL 4.11
PRODUKSI KAYU GERGAJIAN DARI IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014 m3	2015 m3	2016 m3	2017 m3	2018 m3	2019 m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	1.310,51
2	Sumatera Utara	134.134,08	120.171,25	121.908,57	130.948,22	203.206,03	241.772,79
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	1.734,28	1.904,79
4	Riau	46.996,51	56.709,71	47.519,71	56.609,96	70.360,48	95.616,00
5	Jambi	1.678,46	2.575,78	694,58	1.343,53	11.478,54	26.705,97
6	Sumatera Selatan	21.349,12	30.534,48	23.535,91	18.395,97	16.108,15	17.616,82
7	Bengkulu	-	-	1.048,28	286,98	1.611,34	12.684,41
8	Lampung	-	-	-	-	21.024,66	60.405,83
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	14.894,70	18.690,48	38.969,71	22.713,18	39.311,37	28.324,42
12	DKI Jakarta	-	1.621,03	-	-	-	-
13	Jawa Barat	8.255,06	15.498,90	19.927,17	19.906,28	27.445,17	30.437,38
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	3.718,38	6.492,13
15	Jawa Tengah	392.932,11	535.609,80	581.724,77	526.259,58	528.703,34	550.215,44
16	Jawa Timur	595.069,54	636.667,28	684.359,77	798.680,78	768.582,46	890.353,26
17	Bali	11.978,19	11.971,24	11.613,23	9.276,62	2.316,31	7.555,27
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	83.938,59	85.081,51	67.773,64	73.049,71	65.318,36	83.377,85
21	Kalimantan Barat	14.145,28	11.683,70	25.149,25	17.701,31	10.429,71	10.284,05
22	Kalimantan Selatan	5.689,43	6.177,33	5.515,89	2.713,01	19.390,87	55.605,00
23	Kalimantan Tengah	11.183,86	12.670,55	21.763,99	28.000,99	42.260,30	92.811,12
24	Kalimantan Utara	37.603,92	42.073,50	40.246,58	29.121,29	26.353,54	37.837,80
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	3.702,96	1.179,19
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	19.687,57
28	Sulawesi Selatan	4.662,41	8.379,63	8.712,73	13.189,04	15.937,28	14.721,78
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	14.389,17
31	Maluku	225,05	-	39,18	-	-	5.382,08
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	5.757,57
33	Papua	96.460,90	125.374,04	112.063,54	109.854,37	106.267,91	126.162,90
34	Papua Barat	45.961,44	57.705,27	61.210,29	54.315,22	93.289,62	90.522,33
JUMLAH		1.527.158,67	1.779.195,47	1.873.776,78	1.912.366,05	2.078.551,06	2.529.113,43

TABEL 4.12
PRODUKSI SERPIH KAYU DARI IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	208.025,29	1.226.427,91	1.131.309,62	1.287.382,08	1.309.524,86	1.306.885,16
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	17.598.027,62	18.490.453,68	18.453.548,28	18.672.662,65	17.469.836,14	16.553.668,33
5	Jambi	3.101.532,27	2.900.163,97	3.242.513,35	3.176.172,46	3.052.723,43	3.105.909,16
6	Sumatera Selatan	488.624,51	1.374.823,10	1.626.226,65	6.547.468,98	8.714.302,58	9.528.393,63
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	62.198,62
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	64.696,46	70.429,59	43.820,32	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1.559.280,69	1.208.952,73	910.478,32	446.805,21	45.171,00	7,82
21	Kalimantan Barat	84.992,55	69.446,00	56.497,55	25.497,68	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Tengah	817.014,39	506.836,97	573.706,36	804.475,28	699.947,40	640.604,70
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	94.743,95	62.156,94	64.344,53	65.525,24	77.527,65	86.669,55
JUMLAH		24.016.937,73	25.909.690,88	26.102.444,98	31.025.989,58	31.369.033,06	31.284.336,97

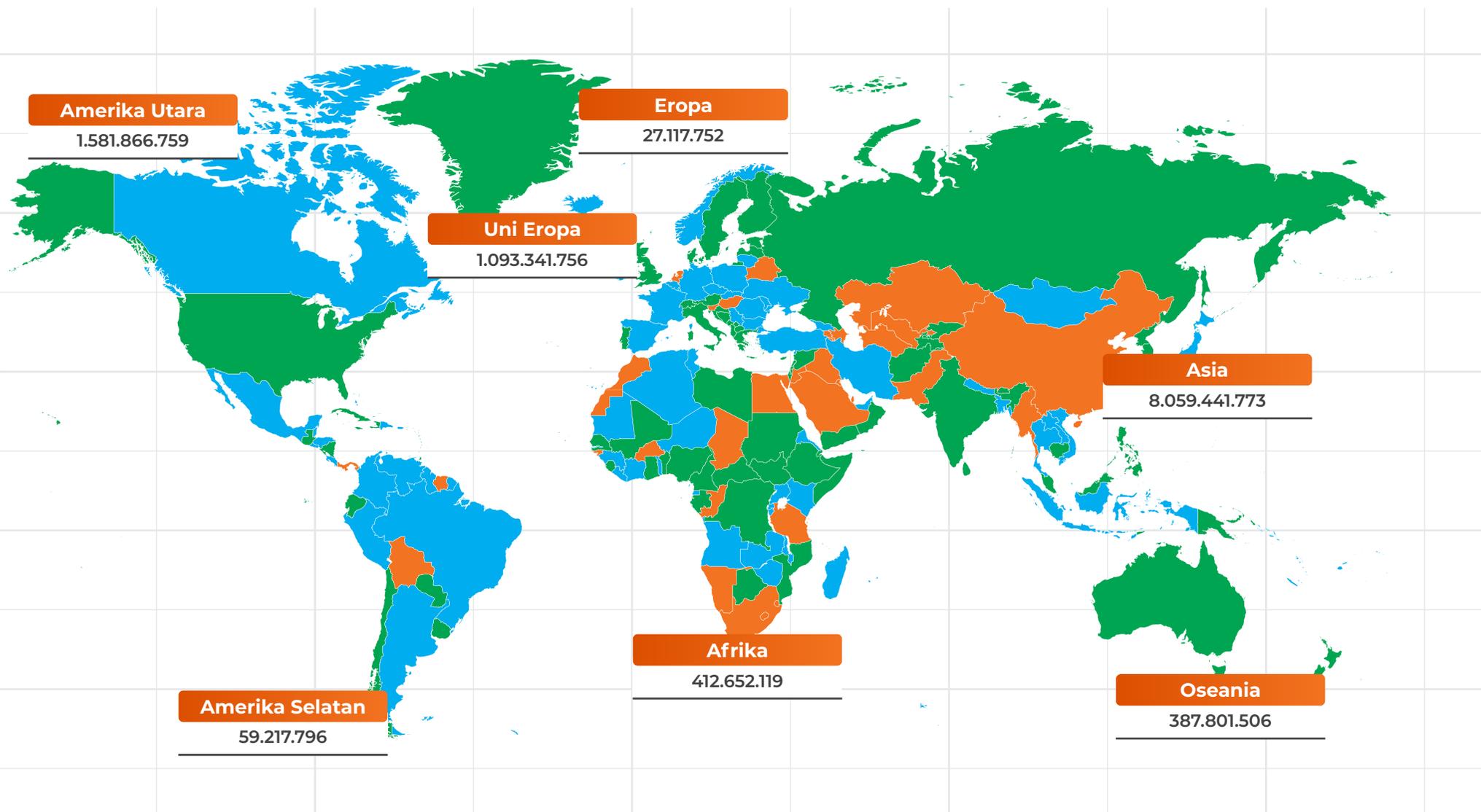
TABEL 4.13
PRODUKSI PULP DARI IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ton	Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	187.609,49	171.270,36	167.985,56	182.291,77	169.905,63	185.160,67
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	4.218.946,73	4.364.376,69	4.398.794,80	4.121.499,69	4.001.383,38	3.840.339,22
5	Jambi	852.794,85	840.572,11	997.778,24	934.846,96	890.243,51	943.425,59
6	Sumatera Selatan	376.345,13	439.015,77	421.477,59	1.820.291,04	2.560.103,88	2.837.705,64
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		5.635.696,20	5.815.234,93	5.986.036,19	7.058.929,46	7.621.636,40	7.806.631,12

TABEL 4.14
PERKEMBANGAN PRODUKSI SELURUH JENIS KAYU OLAHAN PER TAHUN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ton	Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	6,910.50
2	Sumatera Utara	554,302.94	1,547,010.51	1,462,478.65	1,647,190.71	1,749,767.00	1,795,933.56
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	1,734.28	1,904.79
4	Riau	21,980,302.30	23,029,225.18	23,003,246.68	22,928,664.88	21,609,334.23	20,551,815.76
5	Jambi	4,074,745.01	3,885,142.44	4,353,325.77	4,242,980.56	4,140,201.04	4,271,949.76
6	Sumatera Selatan	942,560.98	1,919,017.91	2,124,681.57	8,443,027.46	11,375,163.78	12,482,964.45
7	Bengkulu	11,593.40	14,484.03	3,677.69	286.98	1,611.34	14,381.66
8	Lampung	34,095.70	37,295.98	22,956.02	16,232.18	48,994.23	172,703.73
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
11	Banten	234,344.49	196,465.64	195,125.79	182,112.18	236,208.50	230,331.94
12	DKI Jakarta	-	1,621.03	-	-	-	-
13	Jawa Barat	104,364.50	129,857.43	127,538.01	91,113.12	136,324.47	124,501.83
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	3,718.38	7,658.78
15	Jawa Tengah	1,258,688.56	1,459,029.48	1,561,058.57	1,618,149.61	1,846,964.08	1,827,104.92
16	Jawa Timur	1,735,679.90	1,715,737.89	1,697,072.03	1,984,144.63	2,255,123.21	2,608,778.65
17	Bali	17,973.58	17,969.42	16,736.01	14,224.27	10,105.79	14,435.84
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	1,990.78
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	2,058,629.84	1,752,427.88	1,451,548.30	914,985.34	557,743.35	463,082.69
21	Kalimantan Barat	387,993.03	371,730.61	356,489.21	309,840.57	249,332.61	218,134.60
22	Kalimantan Selatan	444,730.14	464,517.57	521,138.15	495,125.07	502,238.81	512,771.59
23	Kalimantan Tengah	1,020,947.84	706,168.28	730,934.36	965,041.55	852,356.50	806,894.35
24	Kalimantan Utara	181,006.21	167,473.16	179,344.96	161,923.70	170,608.60	186,136.67
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	3,702.96	1,179.19
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	20,434.19
28	Sulawesi Selatan	204,851.18	191,672.99	156,931.19	186,261.12	205,218.33	196,111.21
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	14,389.17
31	Maluku	4,951.83	1,594.94	2,743.75	5,768.60	7,725.95	17,414.02
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	5,757.57
33	Papua	340,121.21	404,947.67	360,137.74	326,999.11	312,847.52	325,843.32
34	Papua Barat	175,128.70	162,468.57	147,682.24	132,211.66	185,919.60	194,026.75
JUMLAH		35,767,011.36	38,175,858.58	38,474,846.71	44,666,283.29	46,462,944.56	47,075,542.27

EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER REGION



CATATAN

- Data bersifat kumulatif pada satu tahun.
- Pemutakhiran data terintegrasi dengan SILK.
- Untuk keperluan analisa data yang ada di dalam sistem/website ini, dapat menghubungi Ditjen PHPL.

TABEL 4.15
PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER JENIS PRODUK
TAHUN 2014 - 2019

No	Produk	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
1	Panel	2.784.725.538,25	2.752.371.326,14	2.661.256.347,09	2.276.453.005,27	2.562.684.805,44	2.148.431.188,97
2	Kertas	980.147.650,33	3.164.540.524,64	3.116.469.210,31	3.457.332.789,83	3.952.314.730,01	3.868.917.652,64
3	Pulp	1.718.772.857,84	1.777.902.392,47	1.620.210.530,10	2.374.480.847,80	2.632.555.720,69	2.778.695.819,30
4	Woodworking	803.341.461,43	788.114.612,30	811.814.209,82	1.286.882.849,11	1.288.836.941,05	1.144.156.550,45
5	Serpih Kayu (Chipwood)	158.597.103,22	158.266.877,82	110.952.464,41	91.020.258,61	46.123.280,73	57.389.329,19
6	Veneer	24.762.524,11	39.639.576,63	54.302.143,09	77.530.800,47	115.261.170,89	91.979.157,80
7	Furnitur Kayu	119.820.789,17	1.117.637.784,26	870.956.028,19	1.353.876.011,78	1.423.146.368,04	1.428.778.504,40
8	Bangunan Prefabrikasi	4.808.052,15	6.035.224,16	3.593.631,49	3.285.776,08	4.682.562,29	5.597.669,52
9	Kerajinan Kayu	16.197.805,12	78.837.098,74	69.954.945,77	92.418.518,87	106.012.076,32	99.493.588,87
JUMLAH		6.611.173.781,62	9.883.345.417,16	9.319.509.510,27	11.013.280.857,82	12.131.617.655,45	11.623.439.461,14

TABEL 4.16
NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER PROVINSI
TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
1	Nangroe Aceh Darussalam	101.011,28	-	-	-	1.053.048.326,34	-
2	Sumatera Utara	284.822.247,39	311.139.665,42	286.958.046,10	352.661.418,57	97.511.697,61	295.974.695,50
3	Sumatera Barat	162.655,76	315.056,22	352.714,25	622.109,51	-	694.197,03
4	Riau	897.112.057,15	1.002.416.230,32	747.218.004,38	755.072.936,66	2.488.155.771,01	556.483.004,06
5	Jambi	207.034.219,96	251.515.553,64	275.177.185,77	287.534.658,09	725.466.563,07	287.490.491,96
6	Sumatera Selatan	65.312.778,82	64.867.301,25	55.326.969,86	646.896.099,18	159.285.402,50	1.403.958.193,68
7	Bengkulu	513.596,90	-	192.722,51	1.161.708,59	-	2.152.027,40
8	Lampung	4.070.273,95	6.245.218,28	6.812.050,97	7.370.128,94	50.487.094,15	9.995.684,79
9	Kep.Riau	745.935,24	9.032.672,36	13.985.987,63	10.620.639,38	-	8.998.662,27
10	Kep. Bangka Belitung	223.875,36	276.998,97	-	-	-	-
11	Banten	132.363.381,71	238.173.461,93	199.961.506,71	235.528.395,00	312.611.392,73	217.580.636,93
12	DKI Jakarta	1.659.503.085,46	3.721.498.692,45	3.698.168.844,23	4.091.893.188,05	1.186.556.884,27	4.330.107.835,22
13	Jawa Barat	253.360.959,98	374.662.533,82	364.512.498,36	385.712.108,79	1.962.526.361,43	387.111.795,41
14	DI Yogyakarta	13.644.308,29	40.433.423,54	41.219.549,63	61.436.473,22	88.468.352,23	61.665.384,69
15	Jawa Tengah	1.014.472.517,97	1.388.311.328,32	1.336.914.526,10	1.549.527.521,50	935.565.829,25	1.486.065.269,05
16	Jawa Timur	1.031.219.321,98	1.439.431.497,37	1.384.511.851,08	1.664.642.869,61	2.341.564.764,90	1.677.229.104,09
17	Bali	8.565.597,73	42.889.972,88	46.333.510,38	64.280.930,76	22.607.890,11	88.778.241,45
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	251.524,00
20	Kalimantan Timur	416.956.020,32	339.159.245,25	257.117.001,51	189.843.673,13	57.195,86	185.750.975,64
21	Kalimantan Barat	180.898.394,14	153.268.865,78	140.948.231,08	145.982.546,33	45.605.726,23	101.666.614,59
22	Kalimantan Selatan	226.632.683,59	225.634.716,54	233.267.106,96	249.347.776,67	510.955.451,09	217.298.338,02
23	Kalimantan Tengah	6.754.397,38	39.927.022,05	38.329.945,80	55.314.028,29	-	57.293.139,23
24	Kalimantan Utara	40.331.908,14	43.512.477,56	32.603.633,35	64.782.025,78	-	77.001.455,45
25	Sulawesi Utara	388.476,88	451.250,00	66.086,00	7.128,55	-	37.250,00
26	Gorontalo	85.312,80	25.000,00	-	-	-	39.893,45
27	Sulawesi Tengah	8.954.070,06	8.684.851,90	6.442.829,59	10.575.796,86	578.322,59	3.065.489,65
28	Sulawesi Selatan	12.453.705,33	25.467.289,51	15.281.207,08	32.552.459,61	42.508,26	33.092.263,31
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	551.036,03	195.743,48	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	1.249.209,86
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	20.723,17
33	Papua	142.849.805,39	151.621.645,61	129.945.823,38	146.560.054,25	147.168.021,34	133.784.249,10
34	Papua Barat	1.090.146,63	4.187.702,73	7.861.677,57	3.354.182,48	3.354.100,48	7.700.722,55
Jumlah		6.611.173.781,62	9.883.345.417,16	9.319.509.510,27	11.013.280.857,82	12.131.617.655,45	11.632.537.071,55

TABEL 4.17
PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER NEGARA TUJUAN EKSPOR
TAHUN 2014 - 2019

No	Negara Tujuan	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
1	Tiongkok	1.976.529.223,16	2.181.167.751,07	2.034.548.490,58	2.819.587.819,89	3.058.805.591,49	2.880.950.110,02
2	Jepang	1.032.721.679,93	1.361.690.750,68	1.284.644.930,81	1.327.592.947,28	1.509.623.741,31	1.366.453.646,44
3	Amerika Serikat	580.924.738,97	1.099.089.526,43	836.849.058,43	1.130.011.404,17	1.414.861.071,98	1.359.596.182,05
4	Korea Selatan	461.742.237,89	574.096.532,76	550.752.629,83	624.790.484,72	734.585.527,51	711.136.154,62
5	India	147.388.453,70	287.084.852,86	368.166.495,15	488.452.196,31	480.614.489,04	496.896.133,94
6	Australia	265.155.923,16	340.096.853,93	337.100.680,13	361.275.566,02	371.167.167,32	316.190.658,78
7	Malaysia	124.408.467,03	311.312.686,04	331.325.376,01	343.594.904,51	383.604.715,95	376.732.877,19
8	Taiwan	229.161.079,26	295.380.652,28	299.713.178,54	318.454.609,73	325.853.752,17	305.563.242,09
9	Britania Raya	146.337.624,81	222.293.310,13	222.025.953,70	236.751.440,00	275.072.371,87	278.316.676,67
10	Arab Saudi	198.260.274,50	334.493.942,47	182.012.410,36	222.777.720,21	194.328.262,85	180.493.132,37
11	Vietnam	59.267.196,99	186.062.026,51	196.136.765,92	219.743.777,01	275.020.200,47	288.595.634,00
12	Belanda	108.531.387,95	148.839.401,53	150.033.582,37	197.783.073,84	218.676.256,72	220.258.600,58
13	Filipina	43.169.988,15	128.225.592,20	157.161.626,93	188.293.594,56	217.554.463,02	201.735.531,85
14	Bangladesh	87.727.223,89	126.374.613,12	180.685.475,67	165.408.528,31	172.187.370,89	173.962.453,57
15	Thailand	58.091.129,59	132.898.011,73	137.046.059,27	162.231.249,59	168.193.610,52	163.910.288,11
16	Jerman	141.108.832,80	160.662.642,37	147.338.231,69	161.692.977,47	173.245.255,37	155.506.180,87
17	Uni Emirat Arab	97.536.509,01	183.870.313,55	130.458.253,88	142.761.472,86	170.655.386,36	200.073.315,27
18	Turki	16.420.430,78	69.120.467,63	98.557.490,11	124.465.413,78	91.292.407,08	131.711.984,22
19	Lain-lain	836.691.380,08	1.740.585.489,87	1.674.952.820,91	1.777.611.677,56	1.896.276.013,53	1.824.454.268,91
JUMLAH		6.611.173.781,62	9.883.345.417,16	9.319.509.510,27	11.013.280.857,82	12.131.617.655,45	11.632.537.071,55

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (IDR)

TAHUN 2019

PROVISI SUMBER
DAYA HUTAN



1.078.480.330.631,00

DANA REBOISASI



1.653.956.184.846,00

IURAN IJIN
USAHA
PEMANFAATAN
HUTAN (IIUPHH)



154.722.628.899,00

DENDA
PELANGGARAN
EKSPLOITASI
HUTAN (DPEH)



29.956.737.275,00

GANTI RUGI
TEGAKAN

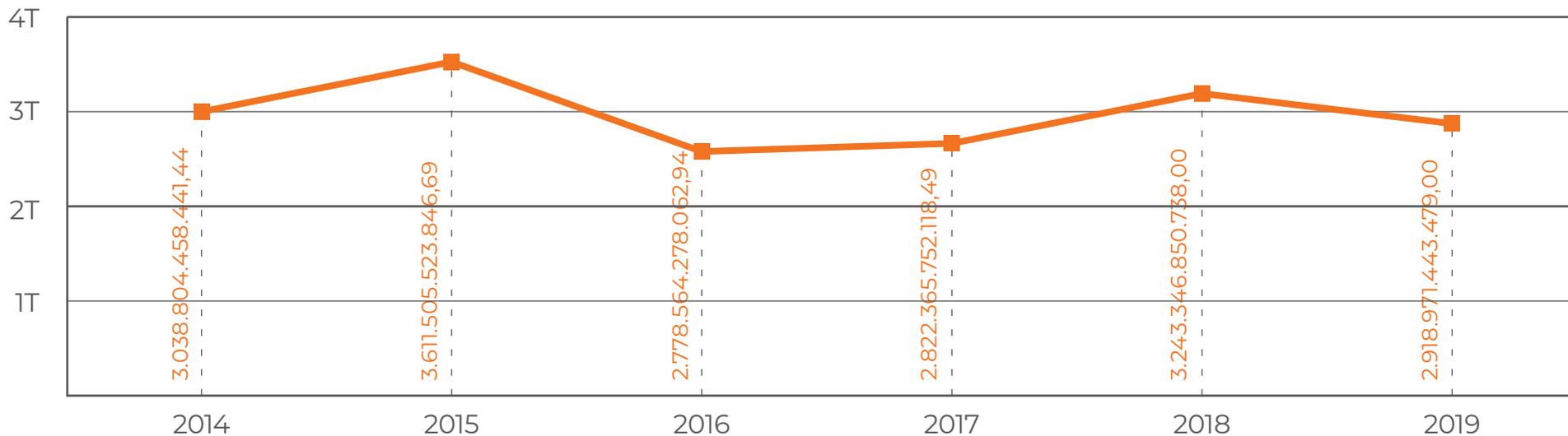


1.855.561.828,00

JUMLAH TOTAL

2.918.971.443.479,00

JUMLAH TOTAL TAHUN 2014 - 2019



TABEL 5.1
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN 2014 - 2019

NO.	JENIS	TAHUN					
		2014 (IDR)	2015 (IDR)	2016 (IDR)	2017 (IDR)	2018 (IDR)	2019 (IDR)
1	Provisi Sumber Daya Hutan	827.472.111.344,00	1.012.830.957.193,00	827.103.441.738,00	917.669.361.849,00	1.141.414.248.868,00	1.078.480.330.631,00
2	Dana Reboisasi	1.706.125.771.409,44	1.958.516.863.082,00	1.724.182.453.008,94	1.712.914.087.182,49	1.982.019.865.564,00	1.653.956.184.846,00
3	Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPHH)	195.937.404.998,00	46.595.948.750,00	130.158.289.122,00	41.285.180.843,00	101.732.195.506,00	154.722.628.899,00
4	Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	18.990.853.702,00	70.187.190.630,00	52.499.467.249,00	130.705.529.408,00	18.094.410.710,00	29.956.737.275,00
5	Ganti Rugi Tegakan	290.278.316.988,00	523.374.564.191,69	44.620.626.945,00	19.791.592.836,00	86.130.090,00	1.855.561.828,00
	TOTAL	3.038.804.458.441,44	3.611.505.523.846,69	2.778.564.278.062,94	2.822.365.752.118,49	3.243.346.850.738,00	2.918.971.443.479,00



**Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



  @DitjenPHPL

  Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

phpl.menlhk.go.id